

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK POLITIK WNI
KETURUNAN DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA**

(Studi Pasal 6 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945)

SKRIPSI

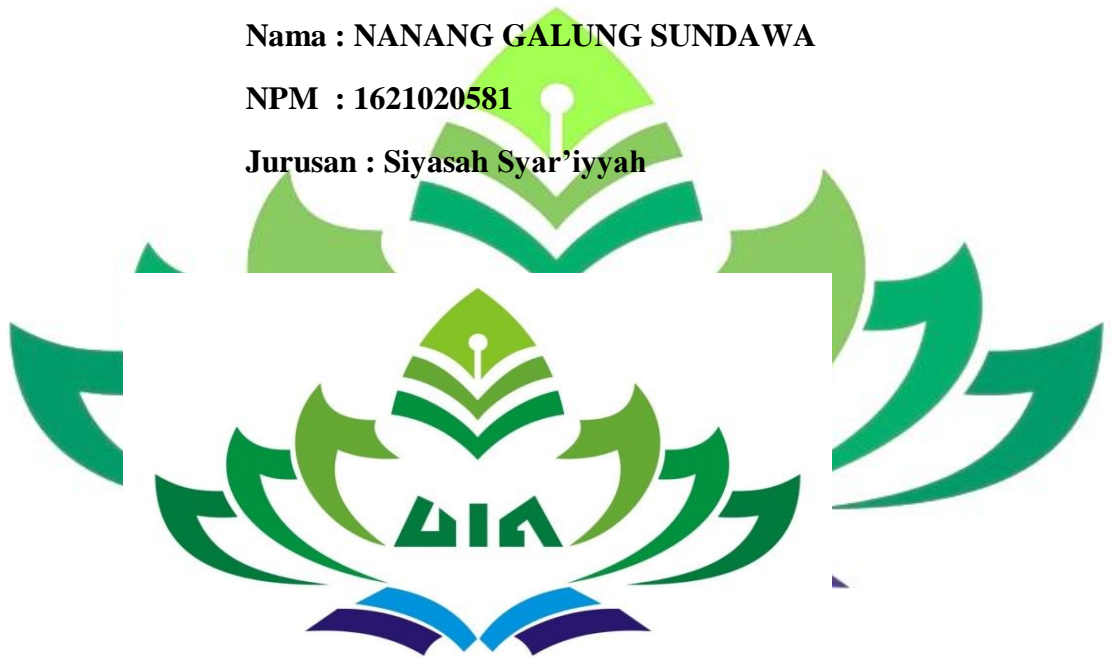
**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah**

Oleh:

Nama : NANANG GALUNG SUNDAWA

NPM : 1621020581

Jurusan : Siyasah Syar'iiyah



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1441 H / 2019 M**

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK POLITIK WNI
KETURUNAN DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA**

(Studi Pasal 6 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syari'ah

Oleh:

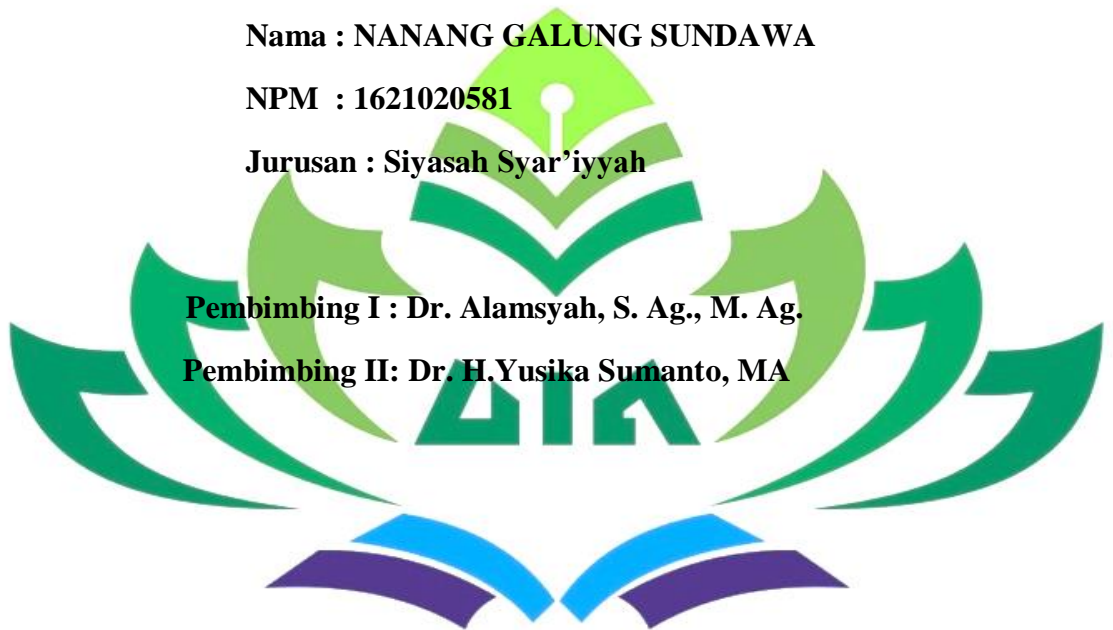
Nama : NANANG GALUNG SUNDAWA

NPM : 1621020581

Jurusan : Siyasah Syar'iiyah

Pembimbing I : Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag.

Pembimbing II: Dr. H.Yusika Sumanto, MA



FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN

LAMPUNG

1441 H / 2019 M

ABSTRAK

Hak politik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam ketatanegaraan disuatu negara, oleh karenanya setiap negara menjamin hak politik warga negaranya tanpa membedakan suku, etnis, dan agamanya. Dalam Islam hak politik warga negara juga telah diatur sedemikian rupa antara lain hak memilih, hak musyawarah, hak pengawasan, hak pemecatan, hak pencalonan dalam pemilihan dan menduduki jabatan, sedangkan dalam konstitusi Indonesia hak politik warga negara telah diatur dalam Undang-Undang dasar 1945 Pasal 27 dan 28. Sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Pasal 26 tahun 1945 yang berbunyi salah satunya Warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Jadi pada hakikatnya warga negara Indonesia keturunan juga merupakan warga Indonesia sehingga tidak ada perbedaan hak dan kewajibannya.

Permasalahan dalam penelitian ini yaitu apa yang bisa menjadi Hak-hak warga negara Indonesia keturunan di Indonesia dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap warga negara Indonesia keturunan dalam konstitusi di Indonesia.

Metode penelitian yang penulis pilih adalah penelitian library research dengan pendekatan normatif yang mana penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan kajian kepustakaan yang bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang, Al-Qur'an, As-Sunnah serta pendapat para ulama dan ahli hukum di Indonesia.

Dalam hukum Islam, jelas bahwa Islam tidak memperkenankan pembedaan warga berdasarkan kelahiran, status sosial, atau profesi. Para ulama berpendapat ada enam macam hak politik yang diakui dalam Islam yaitu hak kebebasan mengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara, hak menduduki jabatan dan pemerintah negara, hak dipilih dalam anggota perwakilan rakyat dan hak memberikan suara dalam pemilu, itu semua berlaku apabila telah memenuhi syarat kewarganegaraan yaitu harus menganut ideologi negara apabila seseorang tersebut ingin menjadi kepala negara, karena dalam sistem Islam negara menerapkan syariat islam. Sedangkan dalam konstitusi Indonesia hak politik warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama khususnya kepada warga negara Indonesia keturunan yang lahir di Indonesia dan juga telah disahkan oleh Undang-Undang sebagai warga negara, namun dalam mencalonkan diri menjadi sebagai kepala negara harus menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lainnya, seperti yang tercantum dalam Pasal 6 Ayat 1 UUD NRI 1945. Kesimpulan berdasarkan uraian diatas adalah bahwa baik hukum Islam maupun konstitusi mengakui adanya hak politik warga negara tanpa ada diskriminasi dan juga mengakui kesetaraan bagi seluruh warga negaranya.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK POLITIK WNI KETURUNAN DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA (Studi Pasal 6 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945)**, disusun oleh **Nanang Galung Sundawa**, NPM. 1621020581, Program Studi: siyasah syar'iyah, telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada hari senin tanggal 11 november 2019

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. H. Khairuddin, M.H. (.....)

Sekretaris : Hendriyadi, M.H.I (.....)

Penguji Utama : Dr. H. A. Kumedi Ja'far, S.Ag., M.H. (.....)

Penguji Pendamping I : Dr. Alamsyah, S.Ag (.....)

Penguji Pendamping II: Dr. H. Yusika Sumanto, M.Ed (.....)

**Dekan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung**

Dr. H. Khairuddin, M.H.
NIP. 196210221993031002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat: JL. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. (0721)704030

PERSETUJUAN

Tim Pembimbing telah mengoreksi dan memberikan masukan-masukan secukupnya, maka skripsi saudara:

Nama : Nanang Galung Sundawa

NPM : 1621020581

Jurusan : Siyasah Syar'iyah

Fakultas : Syari'ah

**Judul : Pandangan Hukum Islam Tentang Hak Politik
Wni Keturunan Dalam Konstitusi Di Indonesia
(Studi Pasal 6 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945)**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197009011997031002

Dr. H.Yusika Sumanto,MA.

Mengetahui,

Ketua Jurusan siyasah syar'iyah

Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag.

NIP. 197111061998032005

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.”(QS. An-Nisa (4) : 58)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan berkah dan hidayah-Nyalah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan, serta kepada junjunganku baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawaku dari zaman jahiliyah kepada zaman yang cerah terang-benderang seperti saat ini, dengan ketulusan dan kerendahan hati penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Bapak Sudarno dan Ibu Wasiah yang tercinta terima kasih atas doa di dalam sujud kalian serta tetesan air mata lelah dan keringat yang terus mengalir demi keberhasilan anakmu, semoga segala pengorbanan, doa dan harapan kalian selalu ananda lakukan, dan semoga ananda selalu menjadi anak yang berbakti kepada orang tua, anak yang soleh, anak yang berguna bagi keluarga, agama, bangsa dan negara.
2. Kedua adik ku Setiawan Dwi Nanda dan Satria Nafa Azamullah yang penulis banggakan yang selalu mendoakan penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat-sahabatku Sofyan Yusuf, Dimas Panji Nugroho, Ramada Hendrian, Alfian Rowiyan.
4. Sahabat terbaik yang selalu menasehati dan menyemangatiku Nika Mustika dan Keluarga (Yuk Jijut dan Umak)
5. Teman-teman seperjuangan Siyash Kelas Internasional (International Class) 2016.
6. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Nanang Galung Sundawa dilahirkan di Natar Kabupaten Lampung Selatan pada tanggal 04 september 1996. Anak pertama dari pasangan Bapak Sudarno dan Ibu Wasiah.

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 2001 pendidikan dimulai dari Taman Kanak-kanak (TK) Bratasena Adiwarna Tulang Bawang dan selesai pada tahun 2002, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bratasena Adiwarna Tulang Bawang selesai tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu Baitul Muslim Way Jepara Lampung Timur selesai tahun 2011, Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Ponorogo selesai tahun 2015, dan mengikuti pendidikan tingkat Perguruan Tinggi pada Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester I tahun akademik 2016/2017.

Bandar lampung,

Yang Membuat,

Nanang Galung Sundawa

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT dzat yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang mana telah banyak memberikan banyak kenikmatan dan hidayah-Nya sehingga dengan izinnya skripsi ini yang berjudul : Pandangan Hukum Islam Tentang Hak Politik WNI Keturunan Dalam Konstitusi Di Indonesia (Studi Pasal 6 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945) dapat terselesaikan.

Shalawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda agung Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah menuju zaman yang cerah penuh dengan rahmat dan semoga kita sebagai umat nya kelak mendapat syafaatnya di hari akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr. H. Moh. Mukri M.Ag selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung
2. Dr. H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Nurnazli, S.H., S.Ag., M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Siyasah
4. Frenki, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Siyasah
5. Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag. dan Dr. H.Yusika Sumanto, MA. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II skripsi yang telah banyak membantu meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya disela-sela kesibukannya, serta memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama penulis duduk dibangku kuliah sehingga selesai.
7. Seluruh guru TK Bratasena Adiwarna, SDN 1 Bratasena Adiwarna, SMPIT Baitul Muslim Way Jepara, dan Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pemikiran selama penulis duduk dibangku sekolah.

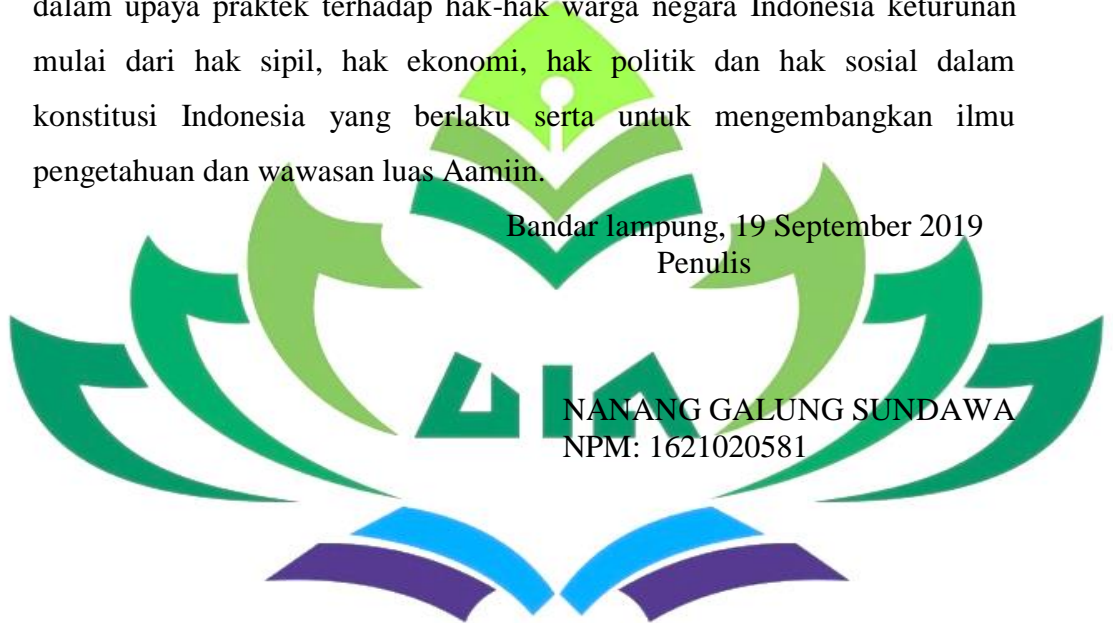
8. Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Syariah khususnya Siyasah yang telah membantu penulisan baik tenaga pikiran maupun bantuan secara materi demi selesainya penelitian ini.

Penulis sadar bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan disebabkan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang saya miliki, untuk itu para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran-sarannya sehingga laporan penelitian ini akan lebih baik dan sempurna.

saya berharap semoga hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dalam upaya praktek terhadap hak-hak warga negara Indonesia keturunan mulai dari hak sipil, hak ekonomi, hak politik dan hak sosial dalam konstitusi Indonesia yang berlaku serta untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan wawasan luas Aamiin.

Bandar lampung, 19 September 2019
Penulis

NANANG GALUNG SUNDWA
NPM: 1621020581



OUT LINE

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PENGESAHAN	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan memilih judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah	14
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	14
F. Metode Penelitian	14

BAB II Hukum Islam Tentang Hak-hak Warga Negara

A. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Hukum Islam	17
B. Macam-macam Warga Negara Dalam Hukum Islam	25
C. Hak-hak Warga Negara dan Kewajibannya	34

BAB III Hak-hak WNI Keturunan dalam Konstitusi Indonesia (UUD 1945 Pasal 6 Ayat 1)

A. Pengertian WNI dan WNI Keturunan	56
B. Sejarah Masuknya WNI Keturunan di Indonesia.....	64
C. Peran Tokoh-tokoh WNI Keturunan dalam Perjuangan Kemerdekaan dan Pembangunan Indonesia.....	65
D. Hak-hak dan kewajibannya dalam konstitusi UUD 1945 .	69
1. Hak sipil dalam konstitusi UUD 1945	76
2. hak ekonomi dalam konstitusi UUD 1945.....	77
3. hak politik dalam konstitusi UUD 1945	78
4. Kewajiban dalam konstitusi UUD 1945	79

BAB IV ANALISIS DATA

- A. Hak-hak Wni Keturunan dalam Konstitusi di Indonesia 80
- B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Aturan Hak Politik WNI Keturunan dalam UUD 1945 81

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 86
- B. Saran..... 89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk menghindari kesalahfahaman dalam proposal yang berjudul **“PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK POLITIK WNI KETURUNAN DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA. (Studi Pasal 6 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945)”**, peneliti akan memberikan penjelasan dan pembatasan istilah, yaitu :

1. Pandangan adalah sebagai cara berpikir seseorang tentang sesuatu yang hal menurutnya benar.¹
2. Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.²
3. Hak Politik adalah hak-hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai seorang anggota organisasi politik, seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum dalam negara. Hak politik juga dapat memberi andil, melalui hak tersebut, dalam mengelola masalah-masalah negara atau pemerintahannya.³
4. Warga Negara Indonesia (WNI) adalah setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia.⁴

¹ Alwi, Hasan, dkk, *Kamus besar bahasa indonesia*, (Jakarta: balai pustaka, 2007), h. 61.

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 4.

³ Mular Ibnu Arif, *Hak-hak Politik Non Muslim dalam Komunitas Islam*, (Bandung: Angkasa, 2005), h. 30.

⁴ Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006, Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, pasal 4.

5. Keturunan adalah merupakan suatu unsur yang esensial serta mutlak bagi sesuatu clan (suku) atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punya, yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya.⁵
6. Konstitusi berasal dari bahasa latin, constitutio. Istilah ini berkaitan erat dengan kata “jus” atau “ius” yang berarti hukum atau prinsip-prinsip.⁶
7. Indonesia adalah nama negara kepulauan di Asia Tenggara yang terletak diantara benua Asia dan benua Australia.⁷

Berdasarkan penjelasan-penjelasan kalimat diatas maka makna dari judul “PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG HAK POLITIK WNI KETURUNAN DALAM KONSTITUSI DI INDONESIA. (Studi Pasal 6 Ayat 1 UUD NRI Tahun 1945)”, adalah hak-hak yang diperoleh seseorang dalam kapasitas nya sebagai seorang anggota organisasi politik seperti hak memilih dan dipilih, mencalonkan diri dan memegang jabatan umum yang merupakan warga negara Indonesia keturunan yang telah tinggal di Indonesia dari berbagai macam etnis yang kewenangannya di berikan oleh hukum islam berdasarkan Al-Quran dan Hadist Nabi SAW serta pendapat para ulama, dan Hukum Tata Negara yang kewenangannya di atur didalam Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang serta Perjanjian Internasional dan pendapat ahli hukum.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan yang mendorong dipilihnya judul skripsi ini adalah :

1. Alasan Objektif

Menganalisis tentang arti hak politik Warga Negara Indonesia keturunan, hal ini disebabkan karena ada bahaya dalam konsep kewarganegaraan yang pertama adanya perilaku diskriminatif terhadap warga negara

⁵ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Diindonesia* Cet Ke-1, (Jakarta: Prenada Mediagrup, 2018), h. 12.

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010), hlm. 3.

⁷ *Ibid*, h. 532.

Indonesia keturunan yang mana selalu ditangkas bahwa mereka tidak mendapatkan ruang atau peluang dalam hal politik melainkan hanya dalam hal ekonomi saja, dan yang kedua adanya identitas politik yang baik itu dari segi agama, etnis, maupun kelas yang mana itu bisa merugikan salah satu warga negara yang tinggal di Indonesia. kemudian penulis meneliti apakah Warga Negara Indonesia keturunan pun memiliki hak yang sama juga seperti halnya Warga Negara Indonesia pada umumnya. Mendalami dan memperluas wawasan terkait masalah hak politik Warga Negara Indonesia keturunan.

2. Alasan Subjektif

Selain alasan diatas yang mendasari dipilihnya judul ini adalah bahwa banyak masyarakat kita belum mengetahui tentang hak-hak Politik Warga Negara Indonesia keturunan di negara ini khususnya dalam hal Hak Asasi Manusia perihal politik. Apalagi ini sangat berkaitan dengan ilmu kewarganegaraan dan ketatanegaraan yang sangat mendasar sekali tentang hidup bermasyarakat di Indonesia ini.

Permasalahan ini belum ada yang membahasnya khususnya di Fakultas Syariah Prodi Siasyah Syariah UIN Raden Intan Lampung , selain itu juga sebagai syarat penulis dalam menyelesaikan strata satu sesuai dengan bidang keilmuan yang penulis tekuni sebagai mahasiswa Fakultas Syariah Jurusan Siyasah Syariah.

C. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang modern atau agama yang relevan dengan kemodernan, karena membawa ajaran-ajaran yang sesuai dengan kemodernan. Islam jelas mendorong kemodernan dan jelas pada misi Islam yang membawa rahmat, kemaslahatan dan perdamaian bagi alam semesta. Jika dihubungkan dasar Islam dengan watak sejarah yang selalu menampilkan kesinambungan dan perubahan (*continuity and change*), akan menunjukkan bahwa Islam mendorong dinamisme dan

perkembangan peradaban yang senantiasa bergerak maju membawa pembaharuan dan kemajuan.

Seperti yang terdapat di dalam kaidah-kaidah fiqh siyasah yang merupakan dasar dalam pengembangan ketatanegaraan antara lain :

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan atau kebijaksanaan kepala negara terhadap rakyat tergantung kepada kemaslahatan”

مَا لَا يُدْرِكُ كُلُّهُ لَا يُشْرِكُ كُلُّهُ

“Apa yang tidak bisa dilaksanakan seluruhnya (secara sempurna) janganlah ditinggalkan seluruhnya”

الْخِيَانَةُ لَا تُجَزَّأُ

“Khiyanah itu tidak dapat dibagi-bagi”

الْوِلَايَةُ الْخَاصَّةُ أَقْوَى مِنَ الْوِلَايَةِ الْعَامَّةِ

“Kekuasaan yang khusus lebih kuat (kedudukannya) dari pada kekuasaan yang umum”

لَا يُقْبَلُ فِي دَارِ الْإِسْلَامِ الْعُذْرُ بِجَهْلِ الْأَحْكَامِ

“Tidak diterima di negeri muslim, pernyataan tidak tahu hukum”⁸

Secara garis besar Islam dan demokrasi di kelompokkan menjadi 3 kelompok pemikiran. Pertama, Islam dan demokrasi adalah dua sistem yang berbeda, kedua, Islam berbeda dengan demokrasi apabila demokrasi didefinisikan secara prosedural seperti difahami dan dipraktikan di negara-negara barat. Dan di kelompok kedua ini menyetujui adanya prinsip-prinsip demokrasi dalam Islam. Para ilmuwan

⁸ J Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002). h. 36.

menyimpulkan tiga prinsip umum ketatanegaraan atau pemerintahan Islam, yaitu :

1. Prinsip musyawarah (*shuro*),
2. Prinsip keadilan (*al-adl*),
3. Prinsip egalitarianisme (*musawah*).

Dan yang ketiga Islam adalah sistem nilai yang membenarkan dan mendukung sistem politik demokrasi seperti yang di praktikan oleh negara-negara maju.⁹

Dalam Islam manusia mendapat kedudukan yang terhormat, sebab selain diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, manusia juga bertugas sebagai Khalifah yang mengatur alam ini. Hal sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am Ayat 165.:



وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya: “Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan Dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu Amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ibnu Khaldun mengungkapkan, “kekhilafahan(kepemimpinan) adalah suatu tugas totalitas dengan rujukannya hukum syariat Allah dalam beragama kepentingan, baik duniawidan juga ukhrawi. Dengan demikian, maka segala permasalahan duniawi dalam kacamata hukum syariat Allah pun merupakan bagian dari permasalahan ukhrawi. Maka sesungguhnya kepemimpinan manusia yang sesungguhnya adalah kepemimpinan mewakili

⁹ Supiana, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), h. 375-376.

¹⁰ Al-An'am (6): 165.

Allah dalam menegakkan ajaran agama-nya dan juga dalam mengatur kehidupan dunia.¹¹

Islam adalah agama yang sangat memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM), hal ini terbukti dengan adanya jaminan Islam terhadap HAM melalui berbagai cara. Menurut Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, setidaknya ada tiga hal yang membuktikan keterkaitan Islam dengan HAM.¹² Pertama, dalam Al- Qur'an memang tidak dipaksakan untuk memeluk agama Islam dan “dibebaskan untuk tidak beragama”. Seperti yang ditegaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqoroh Ayat 256.:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ
بِاللَّهِ فَقَدْ أَسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ¹³

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.

Asbabu nuzul ayat ini berasal dari peristiwa dari seorang sahabat Nabi SAW yaitu Ibnu Jarir yang meriwayatkan dari jalur Sa'id atau Ikrimah dari Ibnu Abbas, dia berkata, “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam),”turun pada seorang lelaki dari anshar yang berasal dari bani salim bin auf yang bernama Al-Hushain. Dia mempunyai dua orang anak yang keduanya beragama Nasrani, sedangkan dia sendiri adalah seorang muslim. Maka dia pun mengadu kepada Nabi SAW, “apakah saya perlu memaksa mereka berdua untuk masuk Islam karena mereka tetap ingin memeluk

¹¹ Ahzami Samiun Jazuli, *Kehidupan Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press,2006), h. 44.

¹² Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press 2004), h. 105.

¹³ Al-baqoroh (2): 256.

agama Nasrani?’ maka Allah menurunkan firman-Nya dalam surah Al-Baqarah ayat 256.

kemudia allah berfirman juga di dalam Surat Al-Kahfi Ayat 29:

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ ۖ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ۚ

Artinya: Dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangny dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir".

Allah berfirman kepada Rasul-Nya Muhammad SAW: katakanlah hai Muhammad kepada umat manusia, apa yang aku bawa kepada kalian dari Rabb kalian adalah kebenaran yang tidak terdapat keraguan didalamnya. Maka barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman dan barangsiapa yang ingin kafir biarlah dia kafir, penggalan ayat ini merupakan ancaman keras. Oleh karena itu Dia berfirman: “sesungguhnya kami telah sediakan bagi orang-orang zhalim itu”. yaitu “neraka yang gejolaknya mengepung mereka”.¹⁵

Kedua, model masyarakat yang dikembangkan Rasul di Madinah melalui piagam Madinah merupakan deklarasi HAM pertama di dunia. Dalam piagam tersebut setiap masyarakat Madinah di bolehkan menganut agama masing-masing dan tidak mengganggu orang untuk beribadah. Karena itu para Ulama memandang bahwa piagam ini merupakan teks sebagai pengakuan Hak Asasi Manusia. Ketiga, dalam

¹⁴ Al-Kahfi (18): 29.

¹⁵ Muhammad Saed Abdul-Rahman, *Tafsir Ibnu Kathir*, (London: MSA Publication Limited, 2012), h. 157.

Islam dikenal 5 bentuk maqoshid syariah atau yang disebut dengan kulliyat al-khomsah (lima prinsip umum) yaitu :¹⁶

1. Hifdzu din (melindungi agama),
2. Hifdzu nafs (melindungi jiwa),
3. Hifdzu aql (melindungi pikiran),
4. Hifdzu mal (melindungi harta),
5. Hifdzu nasab (melindungi keturunan).

Berbicara konsep Kewarganegaraan bukanlah persoalan mudah. Kewarganegaraan tidak hanya berputar pada persoalan KTP, SIM, Paspor atau yang lainnya¹⁷, sehingga muncul asumsi bahwa warga negara atau masyarakat sebagai sub-ordinat dari negara. Bahkan sudah saatnya memaknai warga negara atau Citizenship dengan arti yang sebaliknya, pemaknaan yang selama ini dipahami oleh masyarakat.

Berbicara soal Kewarganegaraan, pada dasarnya berbicara sebuah konsep yang relatif baru. Konsep Kewarganegaraan itu mengimplikasikan sebuah nilai kesetaraan dikalangan masyarakat secara horizontal dan prinsip kedaulatan rakyat berhadapan dengan Negara. Secara horizontal, semua masyarakat itu sama, tanpa membedakan suku, agama, keyakinan atau yang lainnya. Sedangkan secara vertikal, terhadap penguasa, konsep Kewarganegaraan secara inherent mengandung kedaulatan.

Kewarganegaraan adalah anggota dalam sebuah komunitas politik (Negara), dan dengan itu membawa hak untuk berpartisipasi dalam politik. Seseorang dengan keanggotaan tersebut disebut warga negara. Juga dimungkinkan untuk memiliki hak politik tanpa menjadi bangsa dari suatu Negara.¹⁸

¹⁶ Ani Nurul Imtihaanah, Siti Zulaikha, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, (Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2019), h. 21-22.

¹⁷ Mohammad A.S. Hikam, dkk, *Fiqh Kewarganegaraan*, (Jakarta: PB PMII, 2000), h. 1.

¹⁸ Robert W. Hefner, *Civil Islam*, (Jakarta: ISAI, 2000) h. 45.

Secara historis, Citizen atau warga negara lahir dan berkembang pada masa pencerahan, terutama pada abad 18-19, ketika muncul sebuah kesadaran bahwa seorang individu mempunyai hak-hak dasar sehingga ada persamaan antar satu dengan yang lainnya, terlepas dari apa yang menjadi basis sosialnya. Dalam masyarakat feodal di Barat sebelum abad 18 pemaknaannya lebih ditekankan pada objek. Ketika terjadi aufklarung (pencerahan) yang dilakukan oleh kaum borjuis diangkat posisinya secara teoritik dalam rangka mencari pijakan untuk menghadapi raja atau pemilik tanah.

Dalam perkembangannya, persoalan Citizen tidak begitu mengemukakan akibat munculnya Negara-Negara modern yang lebih cenderung pada penggunaan kekuatan Negara dibanding Citizen. Konsep Citizenship juga lebih dikenal dengan pengertian Nasionalisme. Artinya satu warga dari satu Negara dan mengidentifikasikan dirinya bukan dalam pengertian hak-hak warga negara, tetapi lebih pada identitas-identitas nation. Konsep inilah yang kemudian berkembang pada abad 20, ketika itu ada pula perkembangan lain dalam perpolitikan, yaitu terjadi konsep aktualisasi modern mengenai Citizenship atau Kewarganegaraan. Inilah cara mengkonsepsikan Kewarganegaraan yang tidak hanya dalam kerangka filosofis, tetapi dikaitkan dengan basis-basis sosial Kewarganegaraan.¹⁹

Pada tahun 1949 TH Marshall dari Inggris melakukan rekonstruksi, bahwa hak-hak dasar dari Citizen ternyata mempunyai evolusi sesuai dengan kehendak zamannya. Oleh karena itu, evolusi pengertian warga negara dalam pengertian hak dasar ini terbagi dalam tiga bagian. Pertama, pada abad ke-18, ketika hak dalam pengertian hak sipil. Semua orang mempunyai hak-hak dasar sebagai manusia yang merdeka, mempunyai kebebasan yang lain. Kedua, ketika hak sipil sudah

¹⁹ Muhammad A.S. Hikam, *Gerakan Politik Warga Negara dalam Muhammad Nastain dan A. Yok Zakaria Ervani (eds.), Fiqh Kewarganegaraan: Intervensi Agama-Negara Terhadap Masyarakat Sipil*, (Yogyakarta: PB PMII, 2000), h. 1-7.

diperoleh pada abad ke-18 dengan adanya revolusi Prancis dan revolusi Inggris, berubah menjadi hak politik terutama ditandai dengan kaum buruh di Inggris mulai mempunyai hak untuk memilih pada abad ke-19. Ketiga, pada abad ke-20 ketika hak sipil dan hak politik sudah terpenuhi yang menjadi tuntutan kemudian adalah hak sosial dan ekonomi.

Hak-hak dasar tersebut, masih menurut Marshall, diperoleh oleh lapisan bawah masyarakat Inggris, khususnya kelas pekerja secara gradual dan melalui perjuangan bersama sebagai warga negara. Mereka bukan saja mengupayakan terpenuhinya hak-hak sipil dan politik, tetapi juga hak-hak didalam memperoleh jaminan sosial yang layak sebagai sesama anggota komunitas. menurut para penerus teori Marshall, maka perjuangan kewarganegaraan pada fase berikutnya adalah memperoleh hak-hak kultural bagi warga negara, seperti kesamaan gender (gender equality), hak-hak penduduk asli (indigenous people's right), dan hak-hak yang bersifat kultural lainnya.²⁰

Berdasarkan hal tersebut muncul gagasan-gagasan seperti welfare state, ketika kaum buruh bukan hanya mempunyai hak untuk memilih dalam politik, tetapi juga menuntut hak ekonominya untuk hidup yang wajar, cukup makmur dan bebas eksploitasi dari para borjuasi atau kaum kapitalis. Marshall juga membayangkan evolusi yang akan terjadi adalah tuntutan kepada hak kultural.

Jika kemudian konstruksi ini dibawa di Indonesia, maka akan terjadi banyak diskontinuitas. Karena persoalan warga negara di Indonesia dalam sejarahnya tidak mengalami evolusi seperti yang dikatakan oleh Marshall.

Artinya, hak warga negara di Indonesia diperjuangkan bukan hanya berdasarkan kelas sosial, tetapi diperjuangkan dalam rangka

²⁰ Muhammad A.S. Hikam, *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratis Di Indonesia*, (Jakarta : Erlangga, 1999), h. 23.

menghadapi kolonialisme. Hak-hak sipil sebagai hasil dari evolusi pada abad ke-18, di Indonesia justru baru muncul pada abad ke-20, sehingga harus diperjuangkan lebih jauh melalui berbagai evolusi konsep warga negara. Akan tetapi, persoalan warga negara hanya di mengerti pada batasan yang legalistik, yakni warga negara ditafsirkan sebagai orang yang mempunyai kedudukan dan diakui oleh negara sebagai warga dari negara. Sama sekali hal ini tidak dikaitkan dengan hak-hak dasar, seperti hak politik, hak sosial dan hak ekonomi.

Dalam konteks Indonesia, yang disebut warga negara atau kewarganegaraan itu hanya berkisar pada urusan KTP, paspor, kawin dan sejenisnya. Padahal masalah kewarganegaraan adalah persoalan yang mendasar di dalam politik atau demokrasi modern. Hal ini akan berimplikasi pada bagaimana susunan masyarakat atau susunan politik dan sistem politik yang berdasarkan hak-hak dasar. Demokrasi tanpa berpijak pada landasan hak-hak Kewarganegaraan, terutama hak politik dasar seperti hak berbicara, berkumpul dan berorganisasi, tidak ada artinya. Disinilah relevansinya proses pertumbuhan Negara Bangsa Indonesia.

Untuk melihat bagaimana posisi warga negara di dalam perkembangan perpolitikan Indonesia sejak tahun 1945, jelas sekali terlihat bahwa sebenarnya hak-hak Kewarganegaraan atau politik Kewarganegaraan itu masih sangat tertinggal. Hal ini disebabkan realitas struktural dari Negara baru seperti Indonesia sangat obsesif terhadap penguatan elit atau penguatan pada level kekuasaan negara. Hal ini sangat logis, karena seluruh warisan Negara pasca-kolonial selalu berciri seperti percepatan pertumbuhan Negara dan lemahnya perkembangan pada masyarakat atau level warga negara.

Secara konseptual, memang banyak versi yang membicarakan tentang prinsip Kewarganegaraan. Pertama, gaya liberal yang

dikembangkan di negara yang berkembang, yaitu memfokuskan pada dataran legal dan formal. Kedua, model Marshall, yang melihat perkembangan Kewarganegaraan dari asal usul sosial dan kelas sosial. Ketiga, model gagasan baru, yaitu yang bersifat pemahaman fenomologi tentang posisi seseorang sebagai anggota komunitas yang namanya negara. Model yang ketiga ini agak pelik, karena tidak hanya berhenti pada soal kelas, legal formal, tapi bersifat lebih hermeneutik atau penafsiran.

Dari versi yang dijelaskan di atas, yang masih relevan untuk dipakai adalah pendekatan yang dipakai oleh Marshall. Karena, warga negara dapat mengembangkan bukan hanya pada konstruksi Kewarganegaraan dalam bentuk yang bersifat institusi, tapi juga dapat masuk pada gerakan. Warga negara dapat mengintrodusir bahwa siapa kelas masyarakat yang paling terjajah dalam soal Kewarganegaraan. Semuanya dapat mempetakan, kalau kelas sosial yang ada di Indonesia, seperti kelas petani, buruh, NU dan perempuan, yang hak-hak politiknya amburadul.²¹

Ada bahaya yang harus dihindari dari konsep Kewarganegaraan. Pertama, penggunaan identitas politik, agama, etnis dan kelas. Misalnya, dalam rangka PEMILUKADA di DKI Jakarta pada tanggal 15-19 bulan Februari 2017 terkait kasus penistaan agama oleh mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, saya jadi teringat sebuah teori politik yang disebut dengan identity politics atau juga identitarian politics. Politik identitas merupakan gerakan politik berdasarkan atas beberapa kesamaan; baik agama, budaya, suku, profesi, gender dan lain sebagainya. Gerakan politik identitas inilah seperti yang sekarang

²¹ Bahrul Ulum, *Bodohnya NU apa NU Dibodohi?, Jejak Langkah NU Era Reformasi: Menguji Khittah Meneropong Paradigma Pergeseran Politik*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), h. 17.

ini sedang terjadi di Indonesia²², yang mana telah terjadi pada PEMILU bulan Juni 1999, yaitu penggunaan politik identitas agama digunakan secara terbuka.

Kedua, ketika mengkritik perilaku diskriminatif warga negara keturunan khususnya Cina, selalu ditangkis dengan mengatakan secara historis, tidak ada ruang atau peluang dalam hal politik, tetapi hanya dalam ekonomi, padahal argumen ini tidak cukup penjelasannya. Politik bukan hanya terbatas pada sumber daya politik saja, tetapi sumber daya ekonomi itu juga termasuk sumber daya politik.

Dalam posisinya warga negara keturunan Cina harus diberi ruang untuk memperoleh hak sebagaimana warga negara yang lainnya, dan tidak hanya menumpang pada penguasa saja. Mereka harus terlibat dalam proses politik mulai dari yang paling bawah, karena bisa mempengaruhi dan mengontrol sebagaimana mereka mengontrol dalam hal ekonomi.²³

Implikasinya orang-orang warga negara keturunan Cina tidak harus membuat partai politik tersendiri, karena susah dipertanggungjawabkan. Mereka semestinya membuat lembaga swadaya masyarakat. Hal ini dikarenakan, masyarakat masih sangat tidak percaya terhadap orang warga negara keturunan Cina. Jangankan membuat partai politik yang identitasnya jelas untuk orang keturunan Cina, orang keturunan Cina masuk partai politik saja masih sangat dicurigai.

Akan lebih baik orang-orang Tionghoa ini membuat LSM-LSM untuk mengurangi rasisme yang ada di Indonesia atau diskriminasi rasial yang dirasakan oleh orang-orang Tionghoa. Mereka akan lebih efektif menjalankan evolusi dan ketika sudah menjadi gerakan sosial, dengan

²²Ahmad Wazir, "Politik identitas dalam kasus Ahok" (on-line), tersedia di: <https://www.kompasiana.com/ahmadwazier/591d0ff88023bdbe048b4567/politik-identitas-dalam-kasus-ahok> (18 Mei 2017).

²³Bahrul ulum, *Op. cit.*, h. 12.

sendirinya akan menjadi partai politik seperti di Jerman, yang berasal dari gerakan sosial baru.²⁴

Secara filosofis, gagasan Kewarganegaraan merupakan upaya untuk mengangkat posisi kemanusiaan secara equal sebagaimana dikehendaki oleh aufklarung negara demokrasi. Secara pragmatis, untuk melakukan demokratisasi di Indonesia tidak bisa lain kecuali harus melakukan recovery kembali gagasan yang pernah dilaksanakan secara baik. Untuk menerapkan konsep Kewarganegaraan harus memulai dari bawah (bottom up). Jadi sebagai warga negara, bagaimana mempunyai kemampuan dan kemandirian. Warga negara adalah manusia mempunyai kedaulatan individu vis a vis negara. Tidak ada warga negara yang harus tunduk kepada Negara. Sebagai warga negara tugasnya adalah mengontrol Negara.

Berdasarkan Pasal 6 Ayat 1 UUD NRI 1945 yang mengatakan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan wakil Presiden. Permasalahannya adalah timbul pertanyaan apakah warga negara Indonesia keturunan dapat mencalonkan diri menjadi presiden dan calon wakil presiden yang mana mereka sudah sejak lahir hidup di Indonesia dan bahkan tidak pernah mengkhianati negara Indonesia. Ini yang akan menjadi pembahasan pokok dalam penelitian ini dan akan dikaitkan antara hukum Islam dan hukum konstitusi dalam menjadi kepala negara dalam suatu negara.

²⁴ Peter Beilharz, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). h. 327.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah ini adalah:

1. Apa hak-hak warga negara Indonesia keturunan dalam konstitusi di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam tentang Warga Negara Indonesia Keturunan dalam konstitusi di Indonesia?

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Hak-hak Warga Negara Indonesia Keturunan dalam konstitusi di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terkait Hak-hak Politik Warga Negara Indonesia Keturunan dalam konstitusi di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a. Kegunaan secara teoritis yaitu sebagai sarana dalam berbagi ilmu pengetahuan kepada para pembaca dalam memahami terhadap hak politik Warga Negara Indonesia keturunan.
- b. Kegunaan praktis yaitu untuk memperluas wawasan bagi penulis untuk memenuhi syarat ujian akhir semester dalam menyelesaikan studi di fakultas syariah UIN Raden Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Agar kegiatan praktis dalam penelitian dan penyusunan karya ilmiah ini terlaksana dengan objektif, ilmiah serta mencapai hasil yang optimal, maka penulis merumuskan beberapa macam langkah atau metode penelitian yang dipakai dalam karya ilmiah ini adalah metode kualitatif. Hal ini dimaksudkan agar penulisan karya ilmiah sesuai dengan syarat ilmiah yang sudah ditentukan. Adapun syarat-syarat tersebut terdapat didalam metode-metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *library research* dengan pendekatan normatif yang mana penelitian ini dilakukan dengan meneliti bahan

pustaka atau data skunder.²⁵ Dalam penelitian ini penyusun mencari data-data mengenai Kewarganegaraan dalam konstitusi di Indonesia dan hukum Islam serta literatur-literatur primer maupun sekunder untuk mengetahui persamaan dan perbedaan, pertimbangan modifikasi, implikasi dan aplikasi ketiga perihal yang dikaji. Literatur dan penelitian difokuskan pada bahan-bahan pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu pengumpulan data dari literatur-literatur yang relevan terhadap permasalahan yang ada mula-mula disusun secara sistematis, dijelaskan dan dianalisa.

3. Sumber data penelitian

Penelitian ini bersumber dari data sekunder yaitu sumber yang diperoleh dari sumber bermacam-macam seperti data yang diperoleh dari Al-Quran dan Hadist, Undang-Undang Dasar tahun 1945, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Fiqh Kewarganegaraan, Fiqh Siyasah, Buku-buku, Makalah-makalah, Jurnal-jurnal, artikel, internet, dan sumber-sumber yang berkenaan dengan penelitian ini.²⁶

4. Teknik pengumpulan dan pengolahan data

a. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara membaca, menelaah dan mengutip sumber-sumber bacaan yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Pengidentifikasi secara sistematis dan melakukan analisis terhadap dokumen-dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan tema, objek dan masalah penelitian yang dilakukan.²⁷

²⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2011), h. 33.

²⁶Susiadi AS, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung, LP2M IAIN RADEN INTAN), h.75.

²⁷J.Moelang, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosada Karya, 1997), h. 17.

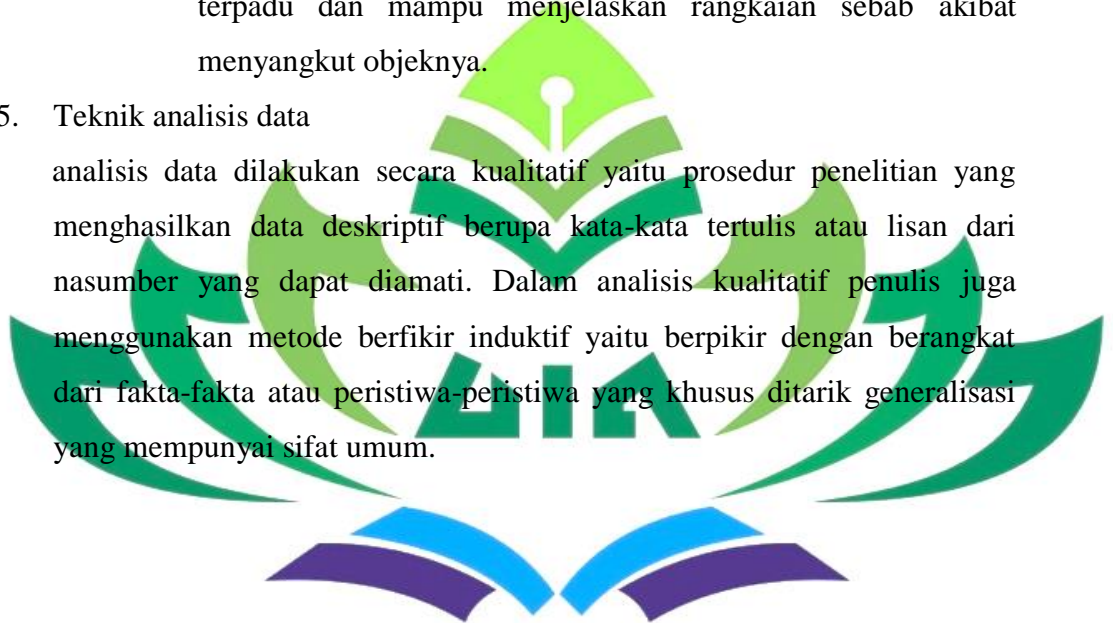
b. Teknik pengolahan data

Pengolahan data dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Editing yaitu proses menyeleksi, mengolah, memeriksa, mengubah dan memperbaiki naskah agar menjadi bahan yang layak dibaca dan dipublikasikan.
- b. sistematisasi data yaitu segala usaha untuk menguraikan yang merumuskan sesuatu dalam hubungan yang teratur dan logis sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, terpadu dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat menyangkut objeknya.

5. Teknik analisis data

analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari nasumber yang dapat diamati. Dalam analisis kualitatif penulis juga menggunakan metode berfikir induktif yaitu berpikir dengan berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus ditarik generalisasi yang mempunyai sifat umum.



BAB II

Hukum Islam Tentang Hak-hak Warga Negara

A. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Hukum Islam

Hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu hukum dan Islam. Istilah hukum berasal dari bahasa Arab *hakama yahkumu huk'mun* yang artinya menetapkan.²⁸ Berdasarkan akar kata hakama tersebut kemudian muncul kata al-hikmah yang memiliki arti kebijaksanaan. Hal ini dimaknakan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang yang bijaksana. Keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang agama. Makna mencegah atau menolak juga menjadi salah satu arti dari lafadz hukmu yang memiliki akar kata hakama tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.²⁹

Sedangkan Islam secara etimologi berasal dari bahasa Arab, terambil dari kosa kata *salima* yang berarti selamat dan sentosa. Dari kata ini

²⁸ Abdul Rohman Sholeh, Iur Adnan Buyung Nasution, Dan Stewart Fenwick, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 2.

²⁹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 1-2.

dibentuk menjadi kata aslama yang berarti memelihara dalam keadaan selamat, sentosa, dan berserah diri, patuh, tunduk dan taat. Dari kata aslama ini dibentuk menjadi Islam (*aslama yuslimu islaman*), yang mengandung arti selamat, aman, damai, patuh, berserah diri dan taat.

Adapun pengertian Islam menurut istilah adalah agama yang didasarkan pada lima pilar utama, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan romadhan, dan melaksanakan ibadah haji apabila sudah mampu.³⁰

Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran Surah Ali Imran Ayat 20 yang berbunyi sebagai berikut :



فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
وَالْأُمِّيِّينَ ءَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ
الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

Artinya: kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran Islam), Maka Katakanlah: "Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan (demikian pula) orang-orang yang mengikutiku". dan Katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Al kitab dan kepada orang-orang yang ummi: "Apakah kamu (mau) masuk Islam". jika mereka masuk Islam, Sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, Maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan (ayat-ayat Allah). dan Allah Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan tuhanNya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan tuhanNya (Allah) haruslah merasa kerdil,

³⁰ Chuzaimah Batubara, Iwan, Dan Hawari Batubara, *Handbook Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Prenamedia Grup, 2018), h. 5.

³¹ Ali imran (03): 20.

bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah SWT. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu pengetahuan Allah SWT. Kemampuan manusia bersifat kerdil dan sangat terbatas, dan semisal terbatas pada kemampuan menganalisis, menyusun kembali bahan-bahan alamiah yang telah ada untuk diolah menjadi bahan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mampu menciptakan dalam arti mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada.³²

Berdasarkan beberapa pengertian diatas mengenai Islam, maka Islam sebagai agama keselamatan lahir batin hendaklah dapat memenuhi tiga aspek sebagai berikut:

1. Dalam hubungan vertikal dengan tuhan (Allah), manusia harus berserah diri kepada Allah rabbal alamin tuhan semesta alam.
2. Hubungan sesama makhluk sebagai wujud hubungan horizontal, Islam menghendaki segala bentuk hubungan saling menyelamatkan antara yang satu dengan yang lain (pergaulan sesama yang aman, damai, tentram, kerta raharja, dan gemah ripah loh jinawi).
3. Bagi diri pribadi seorang muslim, Islam dapat menimbulkan kedamaian, ketenangan jiwa, sakinah, dan kemantapan jasmani rohani.³³

³² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Islam*, h. 3.

³³ *Ibid.* h. 4.

Jika kata hukum disandingkan dengan Islam, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang laku manusia mukallaf yang di akui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.³⁴

Selain itu terdapat prinsip-prinsip hukum Islam yang harus diwujudkan yakni, keadilan, rahmah (kasih sayang), hikmah (kebijaksanaan), dan kemaslahatan, baik dengan Allah maupun dengan manusia dan alam.³⁵

Sesuai dengan sunnah yang menyebutkan bahwa Islam adalah rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil alamin), maka hukum Islam dapat diterapkan dalam semua masa, untuk semua bangsa karena didalamnya terdapat cakupan yang begitu luas dan elastisitas untuk segala zaman dan tempat. Hal ini dikarenakan hukum Islam berdiri atas dua model :

1. Hukum Islam memberikan prinsip umum disamping aturan yang mendetail yang diberikan oleh sunnah sebagai tafsir dari Al-Qur'an, dengan penetapan hal-hal yang seluas-luasnya dan membuka pintu

³⁴ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, Terjemah An Introduction To Islamic Law, (Bandung: Nuansa, 2010), h. 21.

³⁵ Masykuri Abdillah, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, (Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 19.

yang selebar-lebarnya buat kemajuan peradaban manusia. Hukum-hukum yang bersifat umum dalam Al-Qur'an dan As-Sunah mengandung prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah kulliyah yang tidak berubah-ubah. Bidang ini menjadi lapangan kajian yang luas bagi para mujtahid dan terjadi perbedaan faham, perubahan, pergantian, dan perbaikan. Bagian yang mempunyai kaidah-kaidah umum dan prinsip-prinsip yang bersifat keseluruhan inilah yang menjadi dasar dan pedoman yang tetap untuk menghadapi perkembangan masa.

2. Hukum Islam yang mengandung peraturan-peraturan yang terperinci dalam hal-hal yang tidak terpengaruh oleh perkembangan masa, seperti dalam masalah mahram (orang-orang yang haram untuk dikawin), ibadah, harta, warisan. Hukum yang jelas dapat ditetapkan pada kejadian atau kasus tertentu.

Sebelum menginventarisasi tentang prinsip dalam hukum Islam, terlebih dahulu perlu ditelaah, apa yang dimaksud dengan prinsip. Henry Campbell Black mengartikan prinsip sebagai a fundamental truth or doctrine, as law, a comprehensive rule or doctrine which furnishes a basis or origin for other.³⁶

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa asas atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkrit, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang peraturan yang konkret yang terdapat dalam dan belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam

³⁶ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017), h. 55-56.

peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut.

Lebih lanjut Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa memang pada umumnya, asas hukum tidak di tuangkan dalam bentuk peraturan yang konkret atau pasal-pasal seperti misalnya asas bahwa setiap orang dianggap tahu akan Undang-undang, tetapi tidak jarang asas hukum itu dituangkan dalam bentuk peraturan konkret seperti halnya asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege poenali* seperti yang tercantum dalam Pasal 1 KUHP.³⁷

Nasrudin Razak menulis bahwa asas-asas atau prinsip yang di anut dalam hukum Islam , secara singkat dapat dibedakan :

1. Tidak memberatkan
2. Sangat sedikit mengadakan kewajiban secara terperinci yakni memerintah dan melarangnya
3. Datang dengan prinsip graduasi (berangsur-angsur) bukan sekaligus disesuaikan dengan fitrah manusia dan zaman turunannya.³⁸

Terhadap berbagai masalah yang memerlukan hukum, maka hukum islam bertitik tolak dari prinsip akidah islamiyah. Sentrum akidah Islam adalah tauhid. Prinsip ini melandasi semua aspek kehidupan dalam Islam, termasuk aspek hukumnya. Prinsip-prinsip lain selain prinsip tauhid adalah :

³⁷ *Ibid.*, h.57.

³⁸ *Ibid.*, h.58.

1. Prinsip setiap hamba berhubungan langsung dengan Allah

Hukum islam mengacu kepada hukuk yang seluas-luasnya. Ia tidak hanya hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan manusia dengan alam semesta. Ketetapan Allah mencakup semua makhluk-Nya.

2. Prinsip menghadapkan khitbah kepada akal

Manusia mempunyai kemampuan akal di daerah akal praktis (practical reason), sedangkan di balik itu terbentang luas tiada batas daerah akal murni (pure reason) yang hanya diketahui oleh yang maha mengetahui.

3. Prinsip memagari akidah dengan akhlak karimah

Prinsip ini berkaitan dengan kehormatan manusia (*karamah insaniyah*), yaitu kehormatan yang diberikan kepada manusia seperti dinyatakan dalam berbagai Ayat Al-Quran dan Hadist Nabi.

4. Prinsip menjadikan segala macam beban hukum demi kabaikan jiwa dan kesucian.

Prinsip kebaikan jiwa dan kesucian merupakan nilai akhlak yang merupakan dasar lain dalam hubungan antara manusia (perseorangan atau golongan).

5. Prinsip keselarasan antara agama dan masalah hukum (dalam Islam tidak ada “*non menland*”)

Prinsip ini menunjukkan bahwa seluruh hukum Islam yang terinci dalam berbagai bidang hukum bertujuan meraih maslahat dan

menolak mafsadat. Kemaslahatan dan kemafsadatan dunia dapat diketahui dengan jelas. Bagi akal sehat, meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan dalam kehidupan manusia dan makhluk lain merupakan suatu hal baik dan terpuji. Demikian pula dalam hal mendahulukan kemaslahatan serta menolak kemudaratatan.

6. Prinsip persamaan

Bahwa manusia adalah umat yang satu (*ummatan wahidatan*) termaktub dalam beberapa ayat Al-Quran.

Prinsip menyerahkan masalah ta'zir kepada pertimbangan penguasa (hakim)

Prinsip ini menunjukkan keadilan (*'adalah*) yang tertinggi. Keadilan adalah hak semua manusia, baik kawan ataupun lawan.

7. Prinsip toleransi

Toleransi (*tasamuh*) merupakan dasar pembinaan masyarakat dalam islam. Dasar ini tidak menyerah kepada kejahatan atau memberi peluang kepada kejahatan. Allah mewajibkan menolak permusuhan dengan tindakan yang lebih baik. Penolakan ini akan menimbulkan persahabatan bila memang pada tempatnya.

8. Prinsip kemerdekaan dan kebebasan

Kemerdekaan dan kebebasan yang sesungguhnya dimulai dari pembebasan diri dari pengaruh hawa nafsu dan syahwat serta mengendalikannya dibawah bimbingan akal dan iman.

9. Prinsip *ta'awun*

Berdasarkan prinsip *ta'awun* insani (kerjasama kemanusiaan). Allah memerintahkan kita membantu dan menolong didalam kebajikan dan ketakwaan, dan melarangnya didalam kejelekan(dosa) dan permusuhan.³⁹

B. Warga Negara dalam Hukum Islam

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian warga negara adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara itu. Dalam undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia pasal 1 angka (1) pengertian warga negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.⁴⁰

Kata warga negara berasal dari bahasa Inggris, *citizen*, yang memiliki arti warga negara atau dapat di artikan sesama penduduk dan orang setanah air. Warga negara adalah orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara itu sendiri.

Berikut beberapa definisi warga negara menurut beberapa ahli :

1. A.S. Hikam

Mendefinisikan bahwa warga negara merupakan terjemahan dari "*citizenship*", yaitu anggota dari sebuah komunitas yang membentuk negara itu sendiri.

³⁹Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin , S.H, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h.101-103.

⁴⁰*Ibid.*, h. 92.

2. Koerniatmanto S.

Mendefinisikan warga negara dengan anggota negara.

Sebagai anggota negara, seorang warga negara memiliki kedudukan yang khusus terhadap negaranya. Ia memiliki hubungan hak yang bersifat timbal-balik terhadap negaranya.

3. Austin Ranney

Warga negara adalah orang-orang yang memiliki kedudukan resmi sebagai anggota penuh suatu negara.

4. UU No.62 Tahun 1958

Menyatakan bahwa warga negara Republik Indonesia adalah orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian-perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 agustus 1945 sudah menjadi warga negara Republik Indonesia.

Secara umum warga negara mengandung arti peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Jadi secara sederhana warga negara diartikan sebagai anggota dari suatu negara. Istilah warga negara merupakan terjemahan kata *citizen* (Inggris). Kata citizen secara etimologis berasal dari bangsa romawi yang pada waktu itu berbahasa latin, yaitu kata “*civis*” atau “*civitas*” yang berarti anggota warga dari city-state. Selanjutnya kata ini dalam bahasa Prancis diistilahkan “*citoyen*” yang bermakna warga dalam

“*cite*” (kota yang memiliki hak-hak terbatas. Dengan demikian, *citoyen* atau *citien* bermakna warga atau penghuni kota).⁴¹

Disetiap warga negara pada umumnya mempunyai aturan tersendiri atas syarat-syarat yang ditentukan untuk menjadi warga negara dari negara tersebut, namun demikian dalam ilmu pengetahuan terdapat 2 asas yang utama, yaitu asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis*.⁴² Yang dimaksud dengan *ius soli* (asas tempat kelahiran) ialah bahwa kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat kelahirannya. seseorang warga negara A, karena ia dilahirkan di negara A. Sedangkan asas *sanguinis* (asas keturunan adalah penentuan kewarganegaraan seseorang didapat oleh keturunan dari seseorang yang bersangkutan. seseorang adalah warga negara B karena orang tuanya adalah warga negara A.

Penentuan asas kewarganegaraan yang dianut oleh suatu negara adalah merupakan hak masing—masing negara tersebut. Walaupun tidak dapat memenuhi asas *ius soli* dan asas *ius sanguinis* orang dapat memperoleh kewarganegaraan dengan jalan pewarganegaraan atau naturalisasi. Syarat-syarat dan prosedur kewarganegaraan ini di berbagai negara sedikit banyak berlainan, menurut kebutuhan yang dibawa oleh kondisi dan situasi negara masing-masing.⁴³

Islam tidak memperkenankan pembedaan warga berdasarkan kelahiran, status sosial, atau profesi. Masyarakat Islam harus mempunyai lingkup yang

⁴¹Wahyu Widodo, Budi Anwari, Maryanto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset 2015), h.47-48.

⁴²Gouw Giok Siong, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, (Jakarta: Kinta, 1962), h. 17.

⁴³Tim ICCE UIN Jakarta, *Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Prenada Group, 2003), h. 77.

tidak terbatas bagi prestasi pribadi tertentu saja, namun ditentukan oleh tuhan.

Oleh karena itu posisi warga negara, baik muslim maupun non-muslim, Muhammad Asad mengatakan bahwa warga negara yang bertempat tinggal dinegara yang ideologinya negara Islam, dengan arti orang-orang yang sefaham dan menganut kebenaran ideologi tersebutlah yang berhak memimpin warga negara tersebut. Konsekuensinya yang langsung timbul adalah terciptanya penggolongan warga negara muslim (mereka yang menganut ideologi negara) dan warga non-muslim (mereka yang tidak menganut ideologi negara tetapi taat pada peraturan-peraturan negara tersebut).

Menurut Asad, penggolongan warga negara tersebut juga diisyaratkan dalam Al-Quran Surat Al-Anfal Ayat 72:

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَصَرُوا أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِّنْ وَلِيَّتِهِم مِّن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝٧٢

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan (kepada orang-orang muhajirin), mereka itu satu sama lain lindung-melindungi. dan (terhadap) orang-orang yang beriman, tetapi belum berhijrah, Maka tidak ada kewajiban sedikitpun atasmu melindungi mereka, sebelum mereka berhijrah. (akan tetapi) jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam (urusan pembelaan) agama, Maka kamu wajib memberikan pertolongan

⁴⁴ Al-Anfal (08): 72.

kecuali terhadap kaum yang telah ada Perjanjian antara kamu dengan mereka. dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.(QS. Al-Anfal 8:72)

Yang dimaksud lindung melindungi ialah: di antara Muhajirin dan Anshar terjalin persaudaraan yang amat teguh, untuk membentuk masyarakat yang baik. demikian keteguhan dan keakraban persaudaraan mereka itu, sehingga pada pemulaan Islam mereka waris-mewarisi seakan-akan mereka bersaudara kandung.

Ayat tersebut mengandung beberapa prinsip pokok antara lain:

1. Negara Islam bukanlah negara ekstrateritorial, tetapi yang membatasi kewarganegaraannya kepada orang-orang yang tinggal di wilayahnya.
2. Negara Islam melindungi segenap orang-orang yang berada di tanah tumpah darah orang islam yang bersangkutan. Negara Islam tidak memberikan perlindungan kepada muslim yang berada diluar wilayah negara islam.
3. Persyaratan dasar dari kewarganegaraan adalah beriman, dan penduduk asli suatu negara islam yang berdomisili di negara Islam tersebut. Dengan demikian, seorang muslim wajib menempatkan kepentingan pribadinya dibawah pengabdian ke negara Islam.⁴⁵

Islam memberikan kedudukan manusia adalah sama bagi yang muslim, yang membedakannya adalah derajat ketaqwaannya, namun islam juga memperlakukan manusia secara adil tanpa membeda-bedakan kebangsaan,

⁴⁵Muhammad Iqbal, Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, 2017), h.165-167.

warna kulit, dan agamanya. Akan tetapi, dalam kaitannya dengan negara islam membuat berbagai ketentuan yang mengatur hubungan antar sesama manusia, baik muslim sendiri maupun non muslim. Para ulama fiqh membagi kewarganegaraan seseorang menjadi muslim dan non-muslim. Orang non-muslim terdiri dari ahl al-dzimmi dan musta'min. Dengan demikian penduduk dar al-islam terdiri dari muslim, *ahl al-dzimmi*, dan *musta'min*.⁴⁶ penyebutan kaum minoritas non muslim yang menjadi warga negara Islam sebagai kaum dzimmi dipengaruhi oleh pandangan fiqh klasik yang membedakan dunia kedalam 3 wilayah, yakni yang pertamaa wilayah Islam (*Dar al-Islam*) adalah suatu negara yang memerintah dengan kekuasaan kaum muslimin.⁴⁷ Kemudian yang kedua *Dar al-Harbi* makna aslinya rumah atau tempat pertempuran. Imam Bukhari menyebutkan apabila wilayah pernah terjadi pertempuran dengan kaum muslimin maka itu sebagai *Dar al-Harbi*. Tetapi ulama ahli fiqh menyebutkan semua negara yang bukan *Dar al-Islam* atau diperintah oleh pemerintah Islam dengan sebutan *Dar al-Harbi*, walaupun negara itu tak berperang dengan kaum muslimin. Kemudian yang ketiga yaitu *Dar al-Ahdi* yang artinya negara yang mengadakan perdamaian dengan kaum muslimin.⁴⁸

⁴⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash (Kontektualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 231.

⁴⁷ M. Abu Zahrah, *Hubungan Internasional dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), h. 61.

⁴⁸ Maulana Muhammad Ali, *Islamologi Panduan Lengkap Memahami Sumber Ajaran Islam, Rukun Iman, Hukum dan Syariat Islam*, (Jakarta: CV Darul Kutubi Islamiyah, 2016), h. 580.

a. Muslim

Sebutan muslim adalah nama yang diberikan untuk orang yang menganut agama Islam. Ia meyakini dengan sepenuh hati kebenaran agama Islam dalam aqidah syariah sebagai aturan hidupnya. Berdasarkan tempat menetapnya, muslim dapat dibedakan antara muslim yang satu dengan muslim lainnya. Pertama muslim yang menetap di *dar al-islam* yang mempunyai komitmen yang kuat untuk menetap di *dar al-islam*. Termasuk dalam kelompok ini adalah orang islam yang menetap sementara waktu di *dar al-islam* sebagai musta'min dan tetap komitmen kepada Islam serta mengakui pemerintahan islam. Kedua muslim yang tinggal menetap di dar al-harb dan tidak berkeinginan untuk hijrah ke *dar al-islam*. Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad statusnya sama dengan muslim lainnya yang ada di *dar al-islam*. Harta jiwa benda mereka tetap terjaga dan terpelihara, menurut Abu Hanifah, mereka berstatus sebagai penduduk harbiyyun, karena mereka berada di negara yang tidak dikuasai umat islam. Konsekuensinya harta benda mereka tidak terjamin.⁴⁹

⁴⁹ *Ibid.*, h.232.

b. *Ahl al-dzimmi*

Al-dzimmah adalah mufrad dari *dzimmiyan*, diambil dari *dzimmiyan* yang berarti kehormatan dan hak.⁵⁰ Kata “*ahl*” secara bahasa berarti keluarga atau sahabat, sedangkan kata *dzimmi/dzimmah* berarti janji, jaminan, dan keamanan.⁵¹

Dalam pandangan Al-Ghazali (w. 505 h), ahl al-dzimmi adalah setiap ahli kitab yang telah baligh, berakal, merdeka, mampu berperang dan membayar *jizyah*. Ibnu Al-Juzai al-maliki memberikan definisi yang hampir sama dengan Al-Ghazali yaitu mendefinisikan *ahl al-dzimmi* sebagai orang kafir yang merdeka, baligh, laki-laki, mampu membayar *jizyah* dan tidak gila. Al-Unqari (w 1383 h) mempertegas pendapat diatas dengan menyimpulkan bahwa *ahl al-dzimmi* adalah orang non-muslim yang menetap di dar al-islam dengan membayar *jizyah*.⁵²

Secara umum ahl al-dzimmah mempunyai hak yang sama dengan penduduk muslim hanya saja dalam hal politik terdapat perbedaan dengan penduduk muslim. Bahwasanya ahl al-dzimmah dalam hak politik seperti dalam hal kepemimpinan dan jabatan-jabatan tertentu tidak bisa diberikan. Hak jabatan tertinggi dalam pemerintahan, ketua lembaga eksekutif, perdana menteri, panglima perang, hakim untuk kaum muslimin, penanggung jawab urusan zakat dan sedekah

⁵⁰ Majd Al-Din Muhammad Ibn Ya'qub Fairuz Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1995), hlm.117.

⁵¹ Ibrahim Anis, Dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, (Kairo: T.tp, 1972), hlm. 315.

⁵² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontektualisasi Doktrin Politik Islam)*, hlm. 233.

termasuk wakaf dan sebagainya tidak diberikan kepada mereka.⁵³ Al-Maududi menyatakan bahwa semua jabatan pemerintahan terbuka bagi kaum *ahl al-dzimmi*, kecuali sedikit jabatan kunci semisal kepala negara dan majelis permusyawaratan.⁵⁴

Ini bukan berarti bahwa adanya diskriminasi terhadap kaum minoritas, akan tetapi hal ini disebabkan karena golongan minoritas tidak mempunyai hak kepemimpinan dan kekuasaan eksekutif dan yudikatif yang memiliki fungsi menerapkan syari'at Islam. Oleh sebab itu yang menduduki jabatan tersebut dengan sendirinya orang yang meyakini Islam sebagai akidah dan syari'ah.⁵⁵

Sebagai warga negara *ahl al-dzimmah* mempunyai hak untuk mendapat perlindungan dari Allah SWT, Rasulullah SAW, dan kaum muslimin secara keseluruhan. Secara agama, tidak ada yang boleh yang merusak jaminan mereka atau melanggar perjanjian mereka. Perjanjian dan perdamaian yang akan menjaga kehormatan mereka, juga melindungi agama, nyawa, harga diri dan harta kekayaan mereka.⁵⁶

⁵³ Yusuf Al-Qardawi, *Minoritas Non-Muslim Didalam Masyarakat Islam*, (Bandung: Mizan, 1991), h. 35.

⁵⁴ Anis Malik Thoha, *Tren Pluralisme Agama*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 43.

⁵⁵ Salim Ali Al-Bahansawi, *As-Syari'ah Al-Muftara 'Alaiha*, Edisi Bahasa Indonesia Diterjemahkan Oleh Musthalah Maufur, *Wawasan Sistem Politik Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), h. 202.

⁵⁶ Yusuf Al-Qaradhawi, *Al-Din Wa Al-Siyasah*, Edisi Bahasa Indonesia *Meluruskan Dikotomi Agama Dan Politik* Diterjemahkan Oleh Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008), h. 201.

c. *Musta'min*

Secara bahasa *musta'min* merupakan *ism fa'il* (pelaku) dari kata *ista'mana*. Kata ini seakar dengan kata *amana* mengandung pengertian meminta jaminan keamanan, dan orang yang meminta jaminan disebut *musta'min*.⁵⁷

Menurut para ahli fiqh, *musta'min* adalah orang yang memasuki wilayah lain dengan mendapat jaminan keamanan dari pemerintah setempat, baik muslim maupun *harbiyyun*. Menurut Al-Dasuki (w 1230 h) antara *musta'min* dengan *mu'ahhid* mempunyai pengertian yang sama. *Mu'ahid* adalah orang non muslim yang memasuki dar al-islam dengan memperoleh jaminan keamanan dari pemerintah islam untuk tujuan tertentu, kemudian ia kembali ke wilayah dar al-harbi.⁵⁸

Musta'min yang memiliki wilayah dar al-islam bisa sebagai utusan perdamaian, anggota korp diplomatik, pedagang/investor, pembawa jizyah atau orang-orang yang berziarah. Mereka yang bertempat tinggal di dar al-islam dapat berubah status menjadi *dzimmi* melalui perjanjian yang dibuat dengan pemerintahan islam. Istilah *musta'min* juga dapat digunakan untuk orang Islam atau ahl al-*dzimmi* yang memasuki dar al-harbi dengan mendapat izin dan jaminan keamanan dari pemerintah setempat.

Dari penjelasan diatas tadi bahwa yg termasuk warga negara Dar al-Islam yaitu muslim, ahl al-kitab, dan *musta'min*.

⁵⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, h. 236.

⁵⁸ Syam Al-Din Muhammad Ibn 'Irfah Al-Dasuki, *Hasyiyah Al-Dasuki 'Ala Syarh Al-Kabir*, (Mesir: Al-Azhariyah, 1345 H), h. 201

C. Hak-hak Warga Negara Dan Kewajibannya

Dalam sistem kewarganegaraan di Indonesia, kedudukan warga negara pada dasarnya adalah sebagai pilar terwujudnya negara. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka Indonesia mempunyai kedudukan yang sama dengan negara lain di dunia, pada dasarnya kedudukan warga negara bagi negara Indonesia diwujudkan dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang.

Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang tidak atau belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak dari pada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi merreka bekewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadannya seperti ini , maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan di atur dalam Undang-Undang.

Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih dan maju. Yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.

Konstitusi di Indonesia telah mengalami beberapa kali penggantian, jika selama kurang lebih empat tahun setelah kemerdekaan diberlakukan Undang-Undang Dasar 1945 maka selama kurun waktu sekitar delapan bulan berlaku konstitusi RIS hampir diseluruh Indonesia, akan tetapi konstitusi ini diganti dengan Undang-Undang Dasar Serikat 1950 yang kemudian dengan dekrit 5 Juli 1959 dinyatakan tidak berlaku sekaligus memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945.⁵⁹

Ketiga konstitusi ini berbeda satu sama lain. Undang-Undang Dasar 1945 yang sangat singkat itu hanya mencantumkan pada pasal 28 tentang HAM dengan penamaan hak warga negara, sedangkan konstitusi RIS dan Undang-Undang Dasar Serikat 1945 merinci HAM secara detail dalam Pasal 30 Pasal yang ternyata cenderung memiliki kesamaan dengan *universal declaration of human rights*.

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai pengaturan HAM dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dan pengaturan perundang-undangan lain sebagai hukum positif, pada setiap alinea

⁵⁹Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 25.

mencerminkan adanya persamaan dibidang politik, ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Ini berarti substansi ham dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 amat luas tetapi sangat disayangkan kurang mendapatkan penjabaran yang lebih rinci dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 oleh karenanya MPR melalui penetapan nomor : XVII/1998 maupun perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 sampai dengan Pasal 28J lebih memperjelas dan merinci mana yang merupakan HAM dan kewajiban negara. Pengaturan hak dan kewajiban warga negara secara bersamaan dalam hukum positif bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keduanya.⁶⁰

Kewajiban warga negara ini pada dasarnya adalah hak negara. Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki sifat memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Oleh karena itu merupakan hak negara untuk ditaati dan dilaksanakan hukum-hukum yang berlaku di negara tersebut. Sedangkan negara merupakan kewajiban terhadap rakyatnya. Hak-hak warga negara wajib di akui (*receognized*), wajib dihormati (*respected*), dilindungi (*protected*) dan difasilitasi (*facilitated*), serta dipenuhi (*fulfield*) oleh negara. Negara didirikan dan dibentuk memang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup warganya.

Warga negara yang baik adalah warga negara yang tahu akan hak dan kewajiban. Untuk itu mental ideologi pancasila akan terwujud jika hak dan kewajiban yang seharusnya diterima dan dilaksanakan oleh setiap anak

⁶⁰ Muhammad Thahir Azhar, *Negara Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), hlm. 45.

bangsa tanpa terkecuali. Dengan kata lain terpenuhinya hak dan kewajiban yang akan melahirkan warga negara yang baik (good citizen). Segala kemudahan yang dirasakan oleh masyarakat merupakan hak sebagai warga negara. Sedangkan partisipasi masyarakat terhadap negara merupakan kewajiban. Namun, pelaksanaan dari hak dan kewajiban warga negara tersebut tidak mudah karena sebagian warga negara kita masih berurusan dengan kebutuhan pokok mereka yang sulit didapat dinegaranya sendiri. Sangatlah jelas bahwa kesetiaan terhadap bangsa dan negara, komitmen warga negara terhadap negara serta mental ideologi rakyat harus berbanding lurus dengan kesejahteraan.⁶¹

Adapun hak-hak warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut:⁶²

1. Hak warga negara untuk menjadi Presiden dan wakil Presiden.
(Pasal 6 Ayat 1)
2. Hak warga negara untuk memiliki kedudukan sama dalam hukum.
(Pasal 27 Ayat 1)
3. Hak atas penghidupan yang layak
4. Hak dalam upaya pembelaan negara
5. Hak berserikat dan berkumpul
6. Hak mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan
7. Hak memperoleh kesempatan dalam pemerintahan

⁶¹Sutaryo, et. al. *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdsaran Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, Dan Tertinggal(3T)*, (Yogyakarta:Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, 2015), h.154.

⁶²Undang-Undang Dasar RI dan Perubahan Nya, (Jakarta: Penabur Ilmu), h. 8-27.

8. Hak untuk memeluk agama masing-masing.
9. Hak fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara
10. Hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman atas apa yang dimiliki

Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan atau keharusan melaksanakannya. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di suatu negara mempunyai kewajiban sebagai warga negara. Berikut ini adalah kewajiban warga negara Indonesia:⁶³

- a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan. Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945 berbunyi: “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI 1945 menyatakan: “setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.”
- c. Wajib menghormati Hak Asasi Manusia orang lain. Pasal 28J Ayat (1) mengatakan: “setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.”
- d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang Pasal 28J Ayat (2) menyatakan: “dalam menjalankan hak dan

⁶³Baso Madiung, Zainuddin Mustapa, Andi Gunawan Raru Chakti, *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education*, (Jakarta: Celebes Media Perkasa), h. 46.

kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

- e. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945. menyatakan: “tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.

Adapun hak-hak pokok warga negara dalam hukum Islam adalah hak-hak yang mesti dibutuhkan manusia dalam menjaga kelangsungan hidupnya. Apabila manusia tidak beri ruang dalam hak-haknya maka menyebabkan perpecahan setiap manusia. Dalam Islam, diturunkan syariat yaitu untuk melindungi dan memelihara kepentingan umat manusia baik materil, spritual, individual, dan sosial.

Kehadiran Nabi Muhammad SAW sangat signifikan sejak 16 abad yang lalu dalam meletakkan konsep dasar HAM. Cara berpikir dan perilaku Nabi Muhammad SAW menjadi pedoman dalam merumuskan dan mengorientasikan perspektif kehidupan yang agung terhadap sesama umat manusia dalam dimensi humanitis dan spiritualistis. Risalah kenabian Muhammad SAW membingkai proses kehidupan umat manusia seantero dunia, yang merupakan komitmen tuhan terhadap penciptaan manusia

sebagai wakil Allah SWT dimuka bumi ini (khalifatullah fil ardhi) sebagaimana tersebut diatur dalam Surat Al-Baqarah (2) Ayat 30:⁶⁴

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٦٥

Artinya: ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Islam bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Islam tidak mengenal faham diskriminasi atau perbedaan rasionalisme, ideologisme, agamaisme, dan sukuisme. Manusia dimata Allah SWT adalah sama, yang membedakannya hanyalah taqwa yang dimiliki oleh manusia tersebut. Seperti yang di firmankan Allah SWT dalam Surat Al-Hujurat Ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ٦٦

Artinya: "Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah

⁶⁴ Abdul Manan, *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018), h.197.

⁶⁵ Al-Baqarah (2): 30.

⁶⁶ Al-Hujurat(49): 13.

orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

Pengakuan terhadap prinsip kemanusiaan, melalui pemberian otoritas pada setiap manusia agar dapat berkarya untuk merealisasikan derajat kemanusiaan dalam ekonomi, politik, pendidikan, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Ajaran Islam menekankan ukhuwah islamiyah dalam hidup bermasyarakat melalui persamaan dan persaudaraan dan kedamaian yang abadi, itulah sebanya Allah SWT telah mengatur beberapa hak asasi manusia yang harus tetap dijaga, dilestarikan dan di hormati.

Syariat Islam adalah pedoman hidup seluruh umat manusia yang datangnya dari Allah SWT. Dengan tujuan utama yang dapat diterima oleh seluruh umat manusia. Dalam lingkup usul fiqh disebut dengan maqashid al-syari'ah yaitu maksud dan tujuan diturunkannya syariat Islam. Term Syariat dengan makna yang luas meliputi akidah, fiqh, akhklaq, dan segala aspek ajaran Islam.

Konsep maqasid al-syari'ah menjadi tema penting dalam wacana Islam kontemporer yang awalnya merupakan bagian dari ushul al-fiqh dan kini menjadi disiplin ilmu independen dan diajarkan di berbagai institusi pengajian tinggi. Memahami konsep maqashid al-syari'ah harus berpegang kepada kaedah-kaedahnya yang selanjutnya menghasilkan berbagai manfaatnya. Kalangan ulama klasik dalam mengungkapkan maqashid al-syari'ah masih berpijak pada lima prinsip yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sehingga perlu adanya penekanan dalam proses pengembangan lima prinsip tersebut dengan

mengungkapkannya dalam wacana kontemporer sesuai dengan tuntunan zaman.

Penggunaan kembali konsep kunci seluruh pemikiran hukum Islam, masalih al-ammah (memperhatikan kepentingan umum) maka keluwesan teori kaku dari ushul fiqh dirumuskan dengan maqashid al-syariah (tujuan hukum Islam) dan didalam rumusannya dirinci kedalam tiga varian yang disebut al-kulliyat al-syar'iyah: dharuriyyat, hajiyat, dan tahsiniyat.

Sekilas terlihat maqashid al-syari'ah berorientasi pada mashalih-al-ammah (kemaslahatan umum atau manusia) secara global namun secara totalitas meliputi aturan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia bersifat umum sehingga didalamnya ada dimensi ilahi dan dimensi insani. Dimensi ilahi meliputi nilai-nilai ketuhanan bersumber dari Tuhan dan bernilai ibadah. Adapun dimensi insaninya adalah nilai kemaslahatan bagi manusia di dunia dan di akhirat. Selaras dengan perkembangan zaman sehingga konsep maqashid syariah diperluas seperti pemeliharaan persatuan dan pemeliharaan lingkungan karena kedua hal itu sangat penting dalam kehidupan manusia dengan skala makro.⁶⁷

Al-Allamah Rasyid Ridha ketika berbicara tentang maksud-maksud Al-Qur'an (maqashid Al-Qur'an) didalam karyanya yang terkenal, "*al-wahy al-muhammadi*". Dia menyebutkan maksud-maksud syariat dengan cara yang berbeda dengan cara yang digunakan oleh para ahli ushul fiqh tentang tiga derajat maslahat; adh-dharuriyat, al-hajiyat, at-tahsiniyat. Dia menjelaskan

⁶⁷Firman Muhammad Arif, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tana Lawu*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 125-132.

maksud-maksud syariat sesuai dengan tema-tema yang menjadi ajaran islam dan maksud-maksud besar yang ingin direalisasikan oleh Al-Qur'an dalam kehidupan umat. Rasyid Ridha telah membuat sepuluh maksud untuk memperbaiki manusia :

1. memperbaiki tiga rukun agama
2. menjelaskan kenabian, ajaran, dan fungsi ajaran agama yang tidak diketahui oleh manusia, “siapa saja diantara mereka yang benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian dan beramal sholeh.”(Al-Maidah:69).
3. Menjelaskan bahwa Islam adalah agama yang fitrah, akal, ilmu, hikmah, petunjuk, kebebasan, dan kemerdekaan.
4. Reformasi sosial, kemanusiaan, dan politik dengan merealisasikan kelompok delapan.
5. Menegaskan keistimewaan-keistimewaan Islam ketika membebaskan kewajiban. Baik dalam hal ibadah ataupun hal-hal yang dilarang.
6. Menjelaskan dasar-dasar hubungan internasional didalam Islam.
7. Melakukan perbaikan ekonomi.
8. Melakukan perbaikan sistem peperangan, menolak kejelekannya, dan membatasinya hanya dalam hal yang bisa memberikan kebaikan kepada manusia.
9. Memberikan seluruh hak wanita, baik kemanusiaan, agama, dan sipil.

10. Membebaskan hamba sahaya.⁶⁸

Al-Syatibi membagi maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu: *maqashid dharuriyat*, *maqashid hajiyyat*, dan *maqashid tahsiniyat*. *Dharuriyat* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, jika tidak ada akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun islam. *Hajiyyat* maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti *rukhsah* (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsiniyat* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat.

Dharuriyat menjelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan, yaitu:

1. Menjaga agama (*hifzh al-din*)
2. Menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*)
3. Menjaga akal (*hifzh al-'aql*)
4. Menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*)
5. Menjaga harta (*hifzh al-mal*)

Secara substansial maqashid al-syariah mengandung kemaslaahan , baik ditinjau dari maqashid *al-syari'* (tujuan tuhan) maupun maqashid *al-mukallaf* (tujuan mukallaf). Dilihat dari sudut tujuan tuhan , maqashid al-syariah mengandung empat aspek:

1. Tujuan awal dari *syari'* (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan syari'ah yaitu untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Penetapan syariah sebagai sesuatu yang harus dipahami.

⁶⁸Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqh Maqashid Syariah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007), h. 24-

3. Penetapan syariah sebagai hukum taklifi yang harus dilaksanakan.
4. Penetapan syariah guna membawa manusia kebawah lindungan hukum yakni terhindar dari mengikuti hawa nafsu.⁶⁹

Adapun inti dari konsep maqashid al-syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat. Sehingga pemerintah Islam harus menjaga dan memberikan perlindungan terhadap kebutuhan pokok manusia, dan tidak hanya terbatas pada salah satu warga nya saja melainkan seluruh warga negara yang berada di wilayah yang bersangkutan. perlindungan terhadap kebutuhan pokok manusia merupakan inti dari perlindungan hak asasi manusia.

Dijelaskan tentang hak warga negara secara umum dalam Islam di dalam buku Dr. AM. Saefuddin yang berjudul *ijtihad politik cendekiawan Islam yang ditertibkan oleh gema insani antara lain adalah*.⁷⁰

a. Hak persamaan di depan hukum

Persamaan di depan hukum merupakan salah satu manifestasi prinsip persamaan yang di tuntutan oleh keadilan yang dicanangkan Islam, hukum yang dilaksanakan atas semua orang tanpa mengistimewakan dan tanpa membedakan seorang individu karena sebab jenis kelamin,

⁶⁹Yubsir, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam", Jurnal Al-'Adalah, Vol, XI, No. 2 Juli (2013), (Bandar Lampung: Iain Raden Intan, hlm. 242 (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/265/432> (september 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

⁷⁰ A.M. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 8-16.

warna kulit, kedudukan, kekayaan, kekerabatan, atau persahabatan, bahkan akidah atau lainnya yang kontroversial.

b. Hak persamaan didepan peradilan

Dalam pemerintahan Islam, semua warga negara sama di depan peradilan, baik dari segi kepatuhan mereka terhadap keputusan, prosedur yang dipenuhi dalam melakukan dakwaan, dasar-dsar pengaduan, prinsip-prinsip memustuskan, pelaksanaan keputusan, pelaksanaan hukum maupun kewajiban yang berlaku adil di antara orang yang berselisih tidak ada perbedaan satu individu dengan yang lain, bahkan musuh pun merasakan keadilan dan persamaan didepan peradilan ini.

c. Hak kebebasan individual terdiri dari:

1. Hak kebebasan perorangan

Menurut ahli hukum kebebasan perorangan ialah kebebasan bagi tiap individu dalam perjalanan pulang pergi, terpeliharanya diri dari segala bentuk penganiyayaan dan larangan menangkap, menyiksa, dan memenjarakan kecuali dengan tuntutan hukum, serta kebebasan berimigrasi keluar masuk negara. Kebebasan perorangan menurut para ahli hukum ini, bahkan dengan pengertian yang lebih luas, terjamin bagi tiap individu dalam pemerintahan Islam.

Memusuhi kebebasan seperti ini merupakan tindak kezhaliman dan Islam mengharamkannya secara mutlak. Perlindungan pemerintah Islam bagi individu terhadap tindak permusuhan atas kehidupan

fisik meupun kehormatannya, tampak dalam hukuman yang berat bagi para pengganggunya yang tercantum dalam perundang-undangan Islam.

2. Hak kebebasan berkeyakinan dan beribadah bagi non muslim

Islam tidak memaksa seseorang untuk mengubah keyakinannya dan memeluk Islam, walaupun Islam menyerukan untuk itu. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Baqarah Ayat 256 :

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمَرْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^{٧١}

Artinya: “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

oleh karena itu pemerintah Islam tidak memusuhi kalangan non muslim dibawah naungan pemerintah Islam (khalifah) baik keyakinannya maupun ibadahnya.

3. Hak bertempat tinggal

Dalam pemerintahan Islam, tiap individu menikmati hak nya bertempat tinggal, sehingga seorang pun tidak boleh masuk ke tempat tinggalnya kecuali dengan izin dan kerelaannya, karena tempat tinggal seseorang adalah tempat segala rahasia dan tempat

⁷¹Al-Baqarah (2): 256.

menetap keluarganya. seperti firman Allah SWT didalam Surat An-Nur Ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ^{٧٢}

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.”

4. Hak kebebasan bekerja

Dalam pemerintahan Islam, seorang individu berhak melakukan pekerjaan yang dikehendaki, baik perdagangan, perindustrian, ataupun pertanian dengan syarat tidak melakukan pekerjaan yang diharamkan syariat Islam.

5. Hak kebebasan berpendapat

Dalam pemerintahan Islam, kebebasan berpendapat adalah hak individu yang mengantarkannya kepada kepentingan nuraninya yang tidak boleh dikurangi negara atau di tinggalkan individu. hal ini penting bagi kondisi pemikiran dan kemanusiaan setiap individu dan diperlakukan agar seorang muslim melakukan kewajiban-kewajiban Islam.

Prinsip musyawarah dan diskusi-diskusi yang menyertai serta hak memilih, menuntut kebebasan berpendapat. musyawarah tidak mungkin tanpa kebebasan, akan tetapi kebebasan berpendapat

⁷²An-Nur (24): 27.

tidaklah mutlak, ia harus tunduk pada sejumlah batas. antara lain memelihara prinsip-prinsip akidah Islam.

6. Hak menuntut ilmu

Islam telah mewajibkan bagi negara untuk menyelenggarakan pengajaran bagi tiap anggota masyarakat. dalam sunnah nabi, kita menemukan fakta penting yang menunjukkan bahwa kewajiban negara kepada tiap individu untuk memudahkan sarana-sarana memperoleh ilmu pengetahuan.

7. Hak menerima santunan negara

Maksud hak ini adalah bahwa seorang memperoleh jaminan umum dari negara ketika dijerat kebutuhan. Dalam pemerintahan Islam individu tidak mungkin menderita, sementara negara melihat dan memahami posisinya, merasakan ketidakmampuan dan kesulitannya.

Islam mengatur segala bentuk hak-hak warga negara salah satunya yaitu hak politik, dibawah ini akan dijelaskan oleh para ulama apa saja hak-hak politik yang dimiliki oleh warganya.

Hak-hak politik menurut muhammad Anis Qasim Ja'far dibagi menjadi tiga macam yaitu:⁷³

1. Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum.
2. Hak untuk mencalonkan diri menjadi anggota lembaga perwakilan dan lembaga setempat.

⁷³Mujar Ibnu Syarif, *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 2003), h. 67.

3. Hak untuk mencalonkan diri menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampain pendapat.

Ketiga hak politik ini tegas Qasim tidak berlaku kecuali bagi orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu syarat kewarganegaraan. Seseorang boleh menggunakan hak-hak tersebut atau tidak tanpa ikatan apapun. menurut A.M. Saefuddin bahwa tiap individu memiliki hak-hak politik diantaranya hak memilih, hak musyawarah, hak pengawasan, hak pemecatan, hak pencalonan dalam pemilihan dan menduduki jabatan.⁷⁴

Al-Maududi menyatakan ada enam macam hak politik yang di akui dalam Islam yaitu:⁷⁵

1. Hak kebebasan untuk mengeluarkan pokok pikiran, pendapat dan keyakinan.
2. Hak untuk berserikat dan berkumpul
3. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara
4. Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan negara
5. Hak memilih dan dipilih sebagai ketua anggota dan anggota dewan perwakilan rakyat
6. Hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum.

Abd Al-Karim Zaidan menyampaikan mengenai hak-hak politik warga negara dalam Islam antara lain:⁷⁶

⁷⁴A.M. Saefuddin, *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, h. 17-19.

⁷⁵Mujar ibnu syarif, *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam*, h. 52.

⁷⁶Abd Al-Karim Zaidan, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, (Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984), h. 17.

1. Hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara, baik langsung maupun perwakilan
2. Hak musyawarah atau hak untuk ikut berpartisipasi dalam memberikan ide, saran dan kritik yang konstruktif kepada para penyelenggara negara terpilih, utamanya kepala negara, agar tidak melakukan hal-hal yang membahayakan umat/masyarakat
3. Hak pengawasan/hak mengontrol dan meluruskan penyimpangan yang dilakukan oleh para penyelenggara negara
4. Hak untuk memecat atau mencopot kepala negara dari jabatannya bila tidak dapat menjalankan dengan baik tugas yang di amanahkan umat/rakyat.
5. Hak untuk mencalonkan diri untuk jabatan kepala negara atau presiden
6. Hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan

Agar memudahkan dalam sistematika macam-macam hak-hak politik warga negara dalam Islam, dibawah ini akan di paparkan lebih lanjut tentang apa saja hak-hak politik dalam Islam antara lain yaitu:

a. Hak memilih dan dipilih

Mengenai hak politik warga negara untuk memilih dan dipilih, Abd Al-Karim Zaidan menyatakan bahwa setiap warga suatu negara yang telah memenuhi syarat mempunyai hak untuk memilih kepala negara yang dianggapnya mampu mengelola dan mewakili semua urusannya sesuai yang tertulis di dalam Al-Qur'an Surat As-Syura Ayat 38 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا

رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ⁷⁷

Artinya: “dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka”.

Menurut Ayat diatas, Abd Al-Karim Zaidan dengan sangat jelas menyatakan bahwa kaum muslimin utamanya yang penting diputuskan dengan jalan musyawarah. Penentuan calon kepala negara adalah hal yang sangat penting karena dapat berdampak pada seluruh warganya. Hak untuk memilih kepala negara ini dapat pula melalui perwakilan oleh *ahl hal wa al-‘aqq*, yakni tokoh-tokoh yang diteladani dipercaya umat atau warga untuk mengatur segala urusannya.⁷⁸

Seperti halnya seorang warga negara pada umumnya mereka memiliki semua hak-hak politik seperti hak memilih dan dipilih begitupun dengan Islam yang sangat menghargai setiap hak yang dimiliki oleh rakyatnya.

b. Hak berserikat dan berkumpul

Islam juga telah memberiikan hak kepada rakyat untuk bebas berserikat dan membentuk partaaai-partai atau organisasi-organisasi. Hak ini harus tunduk terhadap aturan-aturan umum. Hak ini harus dilaksanakan untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran dalam berserikat dan berkumpul, hal ini terdapat dan disebutkan di dalam Al-Qur’an, tetapi Al-Qur’an

⁷⁷ As-Syura (42): 38.

⁷⁸ Mular Ibnu Syarif, *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam*, h .54.

menganggap itu sebagai keharusan bagi pribadi manusia untuk turut serta mengambil bagian secara aktif dalam urusan-urusan masyarakat yang mengajak manusia berbuat baik dan mencegah munkar serta meyakini Allah SWT.⁷⁹

c. Hak mengeluarkan pendapat

Islam memberikan hak kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat kepada seluruh warga negara Islam dengan syarat bahwa hak untuk digunakan untuk menyebarkan kebaikan dan mencegah segala keburukan seperti apa yang di perintahkan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran Ayat 104 :



وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ⁸⁰

Artinya: “dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung”.

Kesempurnaan Islam seorang muslim tergantung kepada empat syarat yaitu: iman, amal soleh, nasehat-menasehati dalam kebenaran dan menasehati dalam kesabaran. Nasehat-menasehati adalah rangka memberikan pendapat kepada orang lain.⁸¹ Ibnu Jarir Bin Abdullah berkata:

⁷⁹Abu A'la Maududi, *Hak-Hak Manusia Dalam Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 32.

⁸⁰Ali Imran (03): 104.

⁸¹T.M. Hasbi Ash Shiddiqy, *2002 Mutiara Hadits I*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), h. 183.

بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا
رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والنصح لكل مسلم (رواه
بخاري ومسلم)⁸²

*Artinya: “aku berbaiat kepada rasulullah saw untuk bersaksi bahwa
tiada tuhan selain allah dan muhammad adalahh utusan allah,
menegakkan shalat, menuanaikan zakat, senantiasa mendengar dan taat
serta menasehati kepada setiap muslim.” (HR. Bukhari-Muslim).*

Demikian pentingnya menyatakan pendapat dalam Islam demi untuk
kemaslahatan umum. Dengan goresan pena orang dapat menyatakan
pendapatnya, mengetahui pendapat orang lain, dan memperjuangkan hak-
haknya. Dengan menggunakan etika dan gagasan yang dapat mengajarkan
kebaikan serta mencegah kepada kemunkaran. Demikian mengenai hak-hak
warga negara dalam hukum Islam dan bagaimana warga negara dalam
hukum Islam menurut para ulama.

⁸² Muslim Bin Hajjaj Abu Husin Al-Qusyairi, *Shahih Muslim Juz I*, (Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-Arabi, T.Th) h.75.

BAB III

HAK-HAK WNI KETURUNAN DALAM KONSTITUSI INDONESIA (PASAL 6 AYAT 1 UUD NRI 1945)

A. Pengertian WNI dan WNI Keturunan

Pengertian warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara (Pasal 2 UU No. 12/2006)

Timbul suatu pertanyaan, apa yang dimaksud dengan istilah “bangsa Indonesia asli”. Kalau ada yang asli, apakah juga ada yang palsu? Didalam penjelasan Undang-Undang tersebut, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.⁸³

Menurut pasal 4 Undang-Undang No. 12 tahun 2006. Tentang kewarganegaraan RI. Setidaknya ada tiga belas pengertian mengenai siapa itu warga negara Republik Indonesia :

1. WNI adalah setiap orang yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan dan atau berdasarkan Perjanjian Pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum Undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia
2. WNI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia

⁸³Asep Kurnia, *Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.11.

3. WNI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing
4. WNI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia
5. WNI adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut
6. WNI adalah anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya warga negara Indonesia
7. WNI adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara Indonesia
8. WNI adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing yang diakui oleh seorang ayah warga negara Indonesia sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin.
9. WNI adalah anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.
10. WNI adalah anak yang baru lahir ditemukan di wilayah Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.

11. WNI adalah anak yang lahir diwilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya

12. WNI adalah anak yang dilahirkan diluar wilayah Negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu warga negara indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan

13. WNI adalah anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.⁸⁴

Kriteria seseorang disebut sebagai warga negara Indonesia asli dalam uu kewarganegaraan yang lama sangat tidak adil bagi warga keturunan. Semua warga keturunan dianggap sebagai bukan warga negara Indonesia asli. Yang disebut Indonesia asli hanya untuk suku-suku yang ada di wilayah Republik Indonesia dari Sabang sampai Marauke. Ini yang kemudian yang menyebabkan warga keturunan menjadi warga negara “kelas dua”. Para pejabat publik dalam berbagai urusan dokumen untuk warga keturunan, sering memberlakukan syarat dan biaya “khusus” kepada mereka.

Ketentuan-ketentuan diskriminatif ini dihapus oleh Undang-Undang kewarganegaraan No. 12 tahun 2006. Seperti sudah disampaikan bahwa

⁸⁴ *Ibid.*, h. 12-13.

siapa yang disebut sebagai Indonesia asli dan siapa yang tidak termasuk sebagai Indonesia asli dinyatakan secara jelas. Setiap warga negara Indonesia baik itu keturunan Tionghoa, Arab, India, dan etnik lainnya yang sudah lahir dan tinggal turun-temurun di Indonesia adalah bangsa Indonesia asli. Hak dan kewajiban mereka sama dan sejajar seperti warga lainnya.

Secara ringkas, Undang-Undang kewarganegaraan yang baru ini mengelompokkan warga negara dalam dua kelompok yaitu:

1. WNI asli yaitu orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.
2. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI melalui proses pewarganegaraan.

Lebih tegas dalam penjelasan pasal 2 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 ini disebutkan yang dimaksudkan dengan “bangsa Indonesia asli” adalah orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.

Dengan demikian, warga keturunan yang lahir di Indonesia adalah bangsa Indonesia asli yang mempunyai hak dan kewajiban sama seperti warga negara lainnya. Tentu, termasuk hak mereka untuk duduk dalam lembaga publik, menjadi anggota TNI, Polri, dan bahkan menjadi Presiden dan wakil Presiden Indonesia. Ini selaras dengan konstitusi yaitu Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan calon Presiden dan

calon wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan wakil Presiden. Konsekuensi lainnya, tidak perlu lagi SBKRI dalam mengurus dokumen-dokumen sipil.

Dampaknya sangat positif bagi seluruh aspek baik hukum, sosial, budaya, ekonomi maupun politik warga keturunan. Dengan berlakunya Undang-Undang kewarganegaraan yang baru ini maka semua WNI berhak untuk mendapatkan pelayanan publik tanpa diskriminasi termasuk juga berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan sebagai Presiden, wakil Presiden, dan jabatan-jabatan publik lainnya. Selain itu, WNI keturunan yang sudah lahir di Indonesia tidak perlu lagi membuat Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI). Yang penting sekarang adalah semua pihak mengawasi agar implementasinya dilapangan benar-benar sesuai dengan semangat Undang-Undang ini.

Masalah ini memang selalu muncul sejak dulu. Mereka warga bangsa dari keturunan Tionghoa, seringkali dipersulit ketika mengurus dokumen seperti KTP, akte kelahiran dan sebagainya. Dalam mengurus dokumen-dokumen mereka diwajibkan menyertakan “KTP” diskriminasi berupa Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia (SBKRI) atau surat pernyataan keterangan melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Sedangkan warga negara lainnya cukup menyertakan KTP atau akte

lahir. Padahal, mereka warga keturunan itu sudah tinggal di Indonesia bahkan orang tua, kakek, nenek, sudah lahir di Indonesia. Ini sebenarnya bagian dari kelabu dari perjalanan bangsa ini yang harus diakhiri segera.

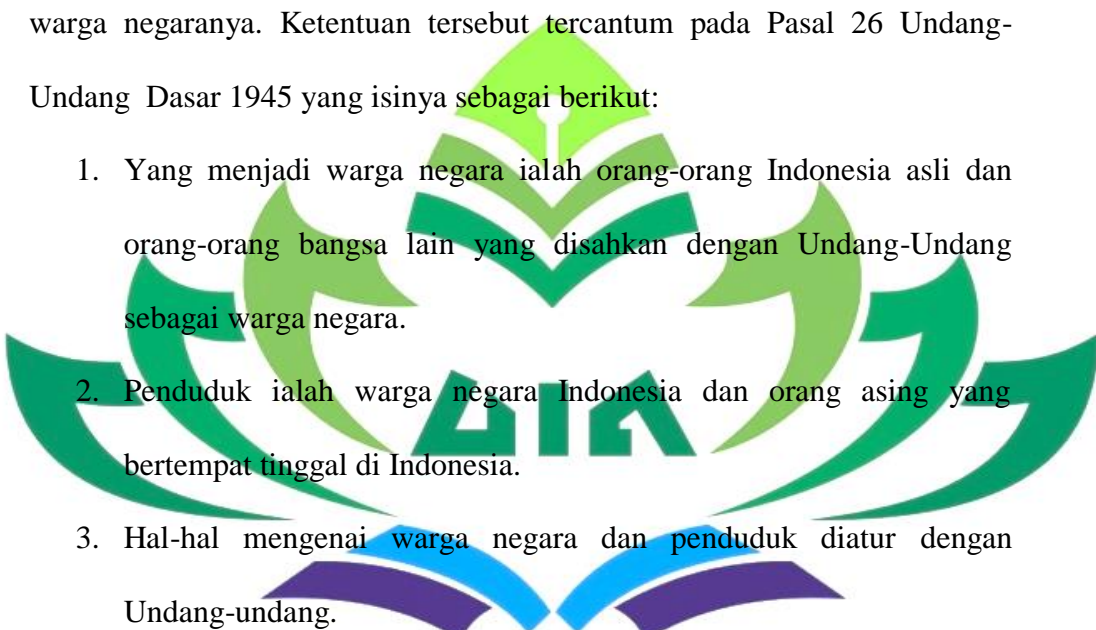
Dalam Undang-undang kewarganegaraan No. 12 tahun 2006 menjadi payung hukum untuk menghapus semua bentuk diskriminasi. Undang-Undang ini sudah berlaku sejak disahkan oleh presiden RI yakni pada tanggal 1 Agustus tahun 2006. Secara hukum tidak ada alasan bagi para petugas untuk memberlakukan peraturan-peraturan lama yang bertentangan dengan Undang-Undang ini. Pasal 44 Undang-Undang no. 12 tahun 2006 telah mencabut dan membatalkan semua peraturan yang bertentangan dengan Undang-Undang ini antara lain:

1. Undang-Undang No. 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan perubahannya.
2. Seluruh peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 62 tahun 1958 yang bertentangan dengan Undang-Undang No. 12 tahun 2006.

Kekhawatiran ini beralasan karena selama ini penegakkan hukum kita masih sangat lemah. Tugas semua pihak adalah mengawasi pelaksanaannya di lapangan. Dalam Undang-Undang yang baru ini ada sanksi pidana apabila pejabat yang bertugas melanggar Undang-Undang ini. Pelanggaran yang dimaksud misalnya menghambat/menghalangi pengurusan dokumen-dokumen kewarganegaraan sehingga orang kehilangan hak kewarganegaraan. Pejabat yang lalai melaksanakan tugasnya menyebabkan seseorang kehilangan hak memperoleh kewarganegaraan atau malah

kehilangan kewarganegaraan dapat dipidana penjara selama satu tahun. Kalau hal tersebut dilakukan dengan sengaja oleh petugas bersangkutan dipenjara sampai dengan tiga tahun. Sebaliknya, orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapat kewarganegaraan termasuk memalsukan dokumen juga diganjar dengan denda atau pidana penjara.⁸⁵

Negara Indonesia telah menentukan siapa-siapa saja yang menjadi warga negaranya. Ketentuan tersebut tercantum pada Pasal 26 Undang-Undang Dasar 1945 yang isinya sebagai berikut:

- 
1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.
 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
 3. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-undang.

Berdasarkan hal diatas, dapat kita ketahui bahwa yang dapat menjadi warga negara Indonesia adalah:

1. Orang-orang bangsa Indonesia asli.
2. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang menjadi warga negara.

Berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, penduduk negara Indonesia terdiri atas dua, yaitu warga negara dan warga asing.

⁸⁵ Libertus Jehani Dan Antanasius Harpen, *Tanya Jawab UU Kewarganegaraan Indonesia*, (Tangerang: Visimedia, 2006), h.17-20.

Ketentuan ini merupakan hal baru dan sebagai hasil amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Sebelumnya, pada masa penjajahan belanda, penduduk indonesia dibagi menjadi 3 (3) yang diatur pada Pasal 163 IS (Indische Staatregeling) tahun 1972, yaitu:

a. Golongan Eropa, terdiri atas:

1. Bangsa Belanda
2. Bukan bangsa Belanda tetapi eropa
3. Orang bangsa lain yang hukum keluarganya sama dengan golongan Eropa

b. Golongan Timur Asing, terdiri atas:

1. Golongan Tionghoa
2. Golongan Timur Asing bukan Cina

c. Golongan Bumiputera atau Pribumi, terdiri atas:

1. Orang Indonesia asli dan keturunannya
2. Orang lain yang menyesuaikan diri dengan orang Indonesia asli dan keturunannya

Dengan adanya ketentuan baru mengenai penduduk Indonesia, diharapkan tidak ada lagi pembedaan dan penamaan penduduk Indonesia atas golongan pribumi dan keturunannya yang dapat memicu konflik antar penduduk Indonesia.⁸⁶

⁸⁶Wahyu Widodo, Budi Anwari, Maryanto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset 2015), h.62-63.

B. Sejarah Masuknya WNI Keturunan di Indonesia

Tahun 1854 diberlakukan yang bersifat segregatif yaitu membagi penduduk menjadi tiga golongan yaitu; 1.Eropa, 2.Timurasing termasuk keturunan Cina, 3.Inlander. menurut Charles Coppel, kebijakan segregatif tidak sesederhana itu, kalau orang Tionghoa tidak beragama Kristen mereka tidak memperoleh keistimewaan. Orang-orang Tionghoa diperlukan sebagai perantara dalam berbagai hal, misalnya sebagai pemungut pajak atau penjual opium. Saat itu mulai muncul streotipe negatif terhadap orang-orang Tionghoa ini.

Pada awal abad ke-20 ketika Belanda menjalankan politik etnis antara lain membuka akses pendidikan bagi kaum pribumi, ini tidak berlaku bagi kalangan Tionghoa, maka tahun 1900 mereka mendirikan sekolah sendiri yaitu THHK (“Tiong Hoa Hwee Kwan”, Zhong Hua Hui Guan). Orang-orang keturunan Arab pun tidak mau ketinggalan, mereka membuka sekolah Jamiatul Khair. Pentingnya pendidikan juga dirasakan elite Jawa sehingga mereka mendirikan Budi Utomo tahun 1928 yang juga bertujuan pada mulanya memajukan pendidikan bagi orang Jawa.

Penemuan arkeologis di Labuhan Deli, Kotacina dan Delitua memperlihatkan bahwa sudah ada pemukiman Tionghoa pada tahun 600-an dan 700-an masehi di daerah Medan dan Semarang. Mobilitas orang Tionghoa secara masif ke Sumatera Timur terjadi setelah terbukanya perkebunan. Jacobus Nienhuys memperoleh sewa jangka panjang (99 tahun)

dari Sultan Deli, didirikannya Deli Maatschappij tahun 1869, sebuah perseroan terbatas pertama di Hindia Belanda yang didukung oleh NHM (Nederlandsche Handel Maatschappij) sebagai pemegang saham 50%.

Sebagai buruh diperkebunan tembakau didatangkan tenaga kerja Cina dari penang sebanyak 120 orang. Namun ini tidak berlangsung lama, karena inggris membatasi dan mengatur tenaga kerja yang keluar dari wilayah kekuasaannya. Akhirnya dilakukan perekrutan kuli dari Cina Selatan yang diikat dengan kontrak kerja. Ini berlangsung sampai akhir abad ke-19. Orang Tionghoa itu berasal dari daerah Cina Selatan dari daerah Kwang Tung, Kwangsi, Swatow, Hainan, Fukein, Hunan, Fu Chow Dan Amoy. Mereka terdiri dari suku Hokkien, Theochiu, Khe (Hakka), Canton (Khong Hu) Dan Liok Hong.

Menurut arsip Tionghoa (Kongkoan) leluhur mereka pertama kali datang di banten, kemudian pergi ke daerah lain seperti Jepara, Lasem, Rembang, Demak, dan Akhirnya Semarang. Orang Tionghoa yang pertama sampai di Semarang Sam Poo Tay Jin. Ada yang mengatakan bahwa dia tak lain dari Laksamana Cheng Ho yang melakukan pelayaran antara 1405 sampai 1433.⁸⁷

C. Peran Tokoh-tokoh WNI Keturunan dalam Perjuangan Kemerdekaan dan Pembangunan Indonesia

Pihak Jepang menyebut di dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) ini bersifat persatupaduan

⁸⁷Irine Hiraswari Gayatri, *Tionghoa Dan Ke-Indonesia-An: Komunitas Tionghoa Disemarang Dan Medan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), h.65-78.

segala penduduk, “karena badan ini disusun dengan teratur dengan hasrat yang berkobar-kobar dan lurus dari pihak segenap penduduk Jawa untuk kemerdekaannya.”

Badan ini meliputi segenap potensi masyarakat, termasuk kaum perempuan. Bahkan warga negara keturunan juga mewakili dibadan penyelidik ini. Dari warga keturunan Tionghoa, ada empat orang menjadi anggota, yaitu Oei Tjong Hauw, Oeij Tiang Tjoei, Liem Koen Hian, Dan Tan Eng Hoa. Dari warga keturunan indo-belanda ada nama DF. Dahler. Dan dari warga keturunan Arab ada Abdurrahman Baswedan.

Kelak saat dibentuk panitia persiapan kemerdekaan, warga keturunan Cina menjadi satu-satunya tetap yang terwakili. Di panitia persiapan kemerdekaan terdapat nama Yap Tjwan Bing. Kehadiran warga negara keturunan dibadan penyelidik, tidak sekedar sebagai pelengkap. Mereka hadir dan aktif mengungkapkan pendapatnya dalam rapat-rapat pleno. Mereka juga aktif dalam berbagai panitia kecil yang dibentuk oleh badan penyelidik.⁸⁸

Pada masa awal kemerdekaan, orang Tionghoa juga berjuang membela dan mempertahankannya antara lain seperti yang dilakukan John Lie dengan menyelundupkan barang hasil bumi dari Sumatera untuk dibarter dengan senjata di Semenanjung Malaya dan Thailand dengan menembus blokade Belanda. John Lie pada tahun 2009 diangkat sebagai Pahlawan Nasional. Setelah merdeka tahun 1945 suasana diberbagai daerah tidak kondusif.

⁸⁸Lukman Hakiem, *Merawat Indonesia Belajar Dari Tokoh Dan Peristiwa*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 25.

Kesadaran kebangsaan ini juga tumbuh dikalangan Tionghoa. Ada empat orang Tionghoa yang menghadiri sumpah pemuda 28 Oktober 1928. Syair lagu Indonesia raya yang digubah oleh WR Supratman pertama kali muncul tahun 1928 disurat kabar Sin Po, koran milik Tionghoa tempat Supratman berkerja sebagai wartawan. Liem Kun hian mendirikan partai Tionghoa Indonesia tahun 1932. Dalam sidang BPUPKI terdapat empat orang Tionghoa termasuk Liem Kun Hian serta seorang pada PPKI yakni Yap Tiam Bing. Dalam sidang BPUPKI kewarganegaraan Indonesia juga diperdebatkan.

Pemerintahan belum terbentuk secara rapih dan vakum kekuasaan dimana menyebabkan munculnya revolusi sosial seperti di Jawa Tengah (dikenal dengan peristiwa tiga daerah yaitu Brebes, Tegal, Pemalang) dan di Sumatera Timur. Penjarahan terhadap harta Tionghoa ini menyebabkan mereka membentuk Po An Tui, semacam satpam yang bertugas menjaga lingkungan serta harta benda mereka. Ketika belanda mmenyerbu Bandung misalnya kota dibumihanguskan dan penduduk mengungsi, namun anggota Po An Tui ini tetap tinggal di kota (untuk menjalankan tugasnya) dianggap oleh sebagian penduduk berpihak kepada Belanda. Citra negatif terhadap Po An Tui seharusnya bisa ditepis dengan menyajikan sejarah yang komprehensif.

Sebelum 1965 terdapat organisasi yang memperjuangkan prinsip intregasi yakni BAPERKI dan prinsip asimilasi oleh Lembaga Pembinaan Kesatuan Bangsa (LPKB) yang didirikan 12 maret 1963 oleh Sunario,

Radius Prawiro, Harry Tjan Silalahi, Junus Jahja, Sindhunata, Soe Hok Gie, Cosmas Batubara, dan Jakob Oetama. Setelah meletus G3OS 1965 dikeluarkan berbagai kebijakan yang merugikan etnik Tionghoa. Saat itu tidak ada pihak yang berani mengkritik pemerintah. Barulah tahun 1974 Gubernur Ali Sadikin membentuk Badan Pembinaan Kesatuan Bangsa (BPKB).

Lembaga ini berubah namanya menjadi Badan Komunikasi Pembinaan Kesatuan Bangsa (BAKOM-PKB) tahun 1977 yang anggotanya delapan orang antara lain Hasjim Ning, Sindhunata, Junus Jahja, dan Nyoo Han Siang. BAKOM PKB bersama dengan CSIS memberikan masukan kepada menteri kehakiman tentang penyelesaian masalah hukum bagi golongan Tionghoa yang di anggap “asing” yang jumlahnya mencapai satu jiwa. Tahun 1985 pengurus BAKOM PKB diperkuat dengan Liem Sioe Liong (Soedono Salim) William Soerdjaya, Jusuf Wanandi, Harry Tjan Silalahi, Sukamdani, dan Aburizal Bakri. BAKOM PKB ini mengusulkan agar para pengusaha besar juga ikut penataran P4. Setelah mengikuti penataran P4, para pengusaha itu mendirikan yayasan prasetya mulia yang diketuai oleh Liem Sioe Liong dkk. Dan ciputra sebagai pelaksana harian. Selain mendirikan Lembaga Pendidikan Institut Manajemen Prasetya Mulya, lembaga ini juga peduli terhadap masalah kewarganegaraan. Atas usul

lembaga ini dikeluarkan instruksi presiden No. 2 Tahun 1980 mengenai SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia).⁸⁹

Kemudian ada atlit WNI Keturunan yang sudah berkali-kali berjuang dan mengharumkan nama bangsa di dunia Internasional membuktikannya. Pemain bulu tangkis dari generasi Tan Joe Hoek sampai ke generasi Chandra Widjaya, Susi Susanti, Haryanto Arbi, Verawati Fajrin, Hendrawan dan atlit lain yang telah berjuang mengharumkan nama bangsa di kancah Internasional tetap wajib menyerahkan SBKRI atau Surat Pernyataan Keterangan Melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok (SMKK-RRT) dalam berbagai urusan yang terkait dengan kewarganegaraan. Sedangkan warga negara lainnya cukup menyertakan KTP atau akte lahir saja.⁹⁰

D. Hak-hak Dan Kewajibannya Dalam konstitusi UUD NRI 1945

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.

Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan

⁸⁹Irine Hiraswari Gayatri, *Tionghoa Dan Ke-Indonesia-An: Komunitas Tionghoa Disemarang Dan Medan*, h.66-73.

⁹⁰*Ibid.*, h. 3.

penghidupan yang layak, tetapi kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya.

Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak daripada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, tetapi mereka juga berkewajiban untuk memikirkan diri sendiri. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.

Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, caranya adalah dengan mengetahui posisi diri kita sendiri. Setiap warga negara harus tahu hak dan kewajibannya.⁹¹

Diskriminasi terhadap kaum minoritas di beberapa negara, tak terkecuali di Indonesia, masih merupakan masalah aktual. Hal ini seharusnya tidak terjadi lagi karena reformasi di beberapa negara telah menghapus diskriminasi apapun bentuknya. Pertanyaannya, mengapa diskriminasi masih saja terus terjadi seakan-akan rakyat kita sudah tak patuh lagi dengan hukum yang berlaku dinegaranya. Untuk menjawab ini, tidak mudah karena penyebabnya cukup rumit, sehingga harus ditinjau dari beberapa unsur, yakni: kebudayaan, seperti politik, ekonomi dan psikologi.

Menurut Theodorson & Theodorson, (1979: 115-116), diskriminasi adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap perorangan, atau kelompok berdasarkan sesuatu, biasanya bersifat kategorikan, atau atribut-atribut khas,

⁹¹Wahyu Widodo, Budi Anwari, Maryanto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, h.61-62.

seperti ras, kesuku bangsa, agama, atau keanggotaan kelas-kelas sosial. Akhirnya perlu juga dijelaskan hubungan antara kelompok (inter group relation). Menurut Theodorson & Theodorson (1979: 212) pada dasarnya, istilah ini berarti penelitian mengenai hubungan antara kelompok, seperti kelompok minoritas dan kelompok mayoritas. Selain itu juga konsisten, atau konflik diantara suku-suku bangsa, atau kelompok-kelompok ras, sehingga dianggap sebagai masalah sosial (social problem).

Sebagai contoh, pada bagian ini pembahasan tentang diskriminasi difokuskan pada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok minoritas yang ada di Republik Indonesia. Kelompok minoritas tersebut dapat berupa suku bangsa (etnis), kelompok agama, dan kelompok gender seperti kaum perempuan dan kaum homoseksual. Berdasarkan kenyataannya walaupun bangsa Indonesia telah merdeka sejak 17 Agustus 1945, serta telah mempunyai UUD 1945 yang bab X tentang “warga negara” pasal 27 Ayat 1 yang menganggap semua WNI memiliki persamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tidak ada pengecualian. Dan ayat 2 mengatakan, bahwa tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun sedihnya , dalam riwayat hidupnya telah diselewengkan oleh para pemimpin-pemimpin orde lama dan terutama mencapai orde baru.

Sebagai contoh misalnya orang Tionghoa di Indonesia bersama-sama dengan orang Arab, India, pada masa kolonial Belanda digolongkan

golongan Timur Asing. Kemudian pada masa kemerdekaan ada ketentuan bagi warga negara keturunan bangsa lain yang menjadi warga Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 bab X pasal 26 Ayat 1.⁹²

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan hukum itu pada kedudukan yang paling tinggi, atau lebih akrab dikenal dengan sebutan *supremacy of law*. Salah satu cirinya adalah adanya pengakuan dan penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM), dan *equality before of law* atau perlakuan yang sama dimuka hukum. Dengan adanya perlakuan yang sama dimuka hukum maka setiap orang berhak untuk diperlakukan sama, adil dan tidak pandang bulu.

Setiap warga negara mempunyai hak untuk dipilih dan memilih dalam pesta demokrasi yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, baik dalam pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati atau Walikota. Dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk tuhan yang maha kuasa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib di hormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi, dapat ditegaskan bahwa hak asasi manusia itu adalah hak fundamental yang tidak

⁹²Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 127-130

boleh dikurangi sedikitpun. Termasuk hak pilih dan memilih bagi warga negara dalam pemilukada.

Hak pilih dan memilih dalam pemilukada adalah satu hak konstitusional warga negara dalam bidang politik, yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia. Jadi, hak pilih seorang warga negara, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah. Mengenai perlindungan hak pilih ini juga telah diatur dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 negara republik indonesia. Yaitu pada ketentuan Pasal 28C ayat 2, Pasal 28D ayat 1, Pasal 28D ayat 3, Pasal 28I ayat 2. Dengan demikian jelas bahwa dalam suatu masyarakat demokratis, yang telah diterima secara universal oleh bangsa-bangsa yang beradab, hak atas partisipasi politik adalah suatu hak asasi manusia, yang dilakukan melalui pemilu yang jujur sebagai manifestasi dari kehendak rakyat yang menjadi dasar dari otoritas pemerintah.⁹³

Ketentuan hukum yang mengatur tentang warga negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 26, Undang-Undang No. 3 tahun 1946, Undang-Undang No. 62 tahun 1958, Undang-Undang. No 3 tahun 1976, dan Undang-Undang No. 12 tahun 2006.

Warga negara Indonesia adalah sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Pasal 26 tahun 1945, yang memuat ketentuan sebagai berikut:

⁹³ M. Hasbi Umar, "Hukum Menjual Hak Suara Dalam Pemilukada Dalam Perspektif Fiqh Siyasah", Jurnal Al-'adalah, Vol, XIII, No. 2 Desember (2014), (Jambi: IAIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, hlm. 255-256 (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/186/393> (18 september 2019), dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah

- a. Warga negara Indonesia ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara.
- b. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat di Indonesia.
- c. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang.⁹⁴

Telah jelas bahwa warga negara Indonesia dari bangsa lain yang disahkan Undang-Undang sebagai warga negara atau warga negara Indonesia keturunan merupakan warga negara Indonesia pada umumnya, mereka mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti warga negara Indonesia lainnya tanpa ada diskriminasi terhadap warga negaranya sendiri yang mana telah di atur didalam Undang-Undang.

Status atau identitas kewarganegaraan sangat penting karena status tersebut menandakan sebuah hubungan hukum antara seorang individu dengan sebuah negara. status tersebut menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan penyelenggaraan hak dan kewajiban sipil sebagai warga negara. identitas kewarganegaraan akan berimplikasi pada hak dan kewajiban sebagai warga negara yang diatur dalam hukum kewarganegaraan.

Hal yang terkait dengan identitas kewarganegaraan seseorang (nationality) dan hak serta kewajiban sebagai implikasi dari identitas itu

⁹⁴Wahyu Widodo, Budi Anwari, Maryanto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, h.64.

(citizenship) melahirkan empat hak warga negara, yaitu hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial. hak-hak tersebut tidak diperoleh begitu saja, akan tetapi melalui perjuangan.

Anthony Giddens menyebutkan ada empat hak yang melekat pada status kewarganegaraan, yaitu hak sipil adalah hak yang berhubungan dengan hak-hak warga, seperti hak untuk hidup, memiliki kekayaan, menikah, beragama, memperoleh perlindungan atas kebebasan pribadi, dan hak untuk memperoleh perlakuan yang adil dalam Undang-Undang. Hak politik adalah produk dari hak sipil, menurut Anthony Giddens, “hanya jika individu diakui sebagai agen otonom barulah seorang individu beralasan kuat dianggap bertanggung jawab secara politik.” hak politik adalah hak yang berhubungan dengan hak memilih penyelenggara negara, hak memperngaruhi kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan oleh penyelenggara negara (hak mengajukan usul, mendukung, memprotes).

Hak ekonomi berkaitan erat dengan hak atas penghidupan dan pekerjaan layak bagi kemanusiaan, misalnya hak atas kontrol pada tempat kerja, seperti pembentukan serikat pekerja, mendapat upah yang layak dan setara, jaminan sosial, batasan jam kerja, hak cuti, dan lain-lain. sedangkan hak sosial adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, pelayanan kesehatan, jaminan sosial bagi yang belum mendapat pekerjaan/lanjut usia, dan pelayanan bagi warga negara yang mempunyai cacat tubuh. hak-hak

ekonomi dan sosial merupakan hasil dari perjuangan menggunakan hak politik.⁹⁵

1. Hak Sipil

Hak sipil warga negara Indonesia tercantum dalam pasal 27 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 antara lain :

- a. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak: “tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” (Pasal 27 Ayat 2).
- b. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan: “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” (Pasal 28A)
- c. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. (Pasal 28B Ayat 1).
- d. Hak atas kelangsungan hidup. “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang.”
- e. Hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya demi kesejahteraan hidup manusia. (Pasal 28C Ayat 1)
- f. Hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. (Pasal 28C Ayat 2)

⁹⁵Sulistiyowati Irianto, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Keadilan Dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), h. 402.

- g. Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum. (Pasal 28D ayat 1)
- h. Hak untuk memiliki hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. (Pasal 28I Ayat 1).

2. Hak Ekonomi


Hak ekonomi tercantum didalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak ekonomi yaitu sebagai berikut:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang- cabang produksi bagi negara dan yang mengasai hajat hidup orang banyak di kuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.⁹⁶

⁹⁶Tim Pusat Studi Pancasila UGM, *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, Dan Tertinggal*, (Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila, 2015), h. 153-154

3. Hak Politik

Hak politik adalah hak yang berhubungan dengan partisipasi hubungan publik dan proses politik, termasuk hak memilih dan dipilih, hak membentuk organisasi dan partai politik, hak untuk mengekspresikan protes dan perlawanan, dan lain sebagainya.⁹⁷ hak politik tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 dan 28 antara lain.⁹⁸

- 
- a. Pasal 27 (1) segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
 - b. Pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang.
 - c. Pasal 28C (2) setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara.
 - d. Pasal 28D (3) setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan sama dalam pemerintahan.
 - e. Pasal 28E (2) setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 - f. Pasal 28E (3) setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

⁹⁷Eric Hiarij Dan Kristian Stokke, *Politik Kewargaan Di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018), h. 29.

⁹⁸Hak Politik Warga Negara: Sebuah Perbandingan Konstitusi (on-line), tersedia di: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> (8september 2019)

Hak politik tercantum juga didalam Pasal 43 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang berbunyi:⁹⁹

1. Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setiap warga negara berhak turut serta dalam pemerintahan dengan langsung atau dengan perantaraan wakil yang dipilihnya dengan bebas, menurut cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
3. Setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan.

4. Kewajiban

Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut adalah beberapa contoh kewajiban kita sebagai warga negara indonesia:

- a. Wajib menaati hukum dan pemerintahan.

Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi:

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

- b. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara dalam upaya pembelaan negara.

⁹⁹ Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, tahun 1999, pasal

Pasal 27 Ayat (3) menyatakan:

“Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara.”

- c. Wajib menghormati HAM orang lain.

Pasal 28J Ayat (1) mengatakan:

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain.”

- d. Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang.

Pasal 28J Ayat (2) menyatakan:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

- e. Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Menyatakan: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.”¹⁰⁰

¹⁰⁰Wahyu Widodo, Budi Anwari, Maryanto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, h.66-67.

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Hak-hak WNI Keturunan dalam Konstitusi di Indonesia

Setelah menguraikan tentang hak-hak warga negara dalam hukum Islam pada Bab II dan hak-hak warga negara keturunan dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, dalam Bab IV ini penulis akan menguraikan analisis dengan didasarkan pada: pertama bahwa negara Indonesia adalah negara yang penduduknya mayoritas muslim dan kedua Indonesia merupakan negara hukum yang warga negaranya bermacam-macam suku dan bangsa sehingga negara harus memberi kebijakan-kebijakan yang sama terhadap seluruh warga negaranya baik penduduk asli maupun penduduk keturunan bangsa lain seperti yang terdapat pada Pasal 2 Undang-Undang No. 12 tahun 2006 :¹⁰¹

3. WNI asli yaitu orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendak sendiri.
4. Orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI melalui proses pewarganegaraan.

Berdasarkan konstitusi di Indonesia warga negara Indonesia keturunan telah diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang yang mana Indonesia membagi warga negara Indonesia menjadi dua kelompok

¹⁰¹ Libertus Jehani Dan Antanasius Harpen, *Tanya Jawab UU Kewarganegaraan Indonesia*, (Tangerang: Visimedia, 2006), h.17.

yaitu wni asli yaitu orang Indonesia yang menjadi warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai WNI melalui proses Pewarganegaraan. Dengan demikian, warga keturunan yang lahir di Indonesia adalah bangsa Indonesia asli yang mempunyai hak dan kewajiban sama seperti warga negara lainnya.

Sementara itu hak politik warga negara Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 mulai dari Pasal 27 Ayat 1 yang berbunyi “segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya” sampai pasal 28E Ayat 3 yang berbunyi “setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”¹⁰², di dalam Pasal 43 Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum (pemilu) berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁰³

Merujuk kepada pasal 6 ayat 1 yang berbunyi “calon Presiden dan calon wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya

¹⁰² Hak Politik Warga Negara: Sebuah Perbandingan Konstitusi (on-line), tersedia di: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> (8september 2019)

¹⁰³ Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Tahun 1999, Pasal 43

dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan wakil Presiden” secara jelas bahwa didalam pencalonan Presiden dan wakil Presiden harus dari warga negara Indonesia yang sejak kelahirannya walaupun mereka berasal dari etnis atau keturunan bangsa lain.

Berdasarkan uraian diatas didalam konstitusi Indonesia bahwa warga negara Indonesia keturunan mempunyai hak-hak yang sama tanpa ada diskriminasi antar warga negara Indonesia, sehingga negara berhak menjamin seluruh hak-haknya karena tidak ada aturan yang menghalangi warga negara keturunan didalam konstitusi Indonesia.

B. Pandangan Hukum Islam Terhadap Aturan Hak Politik WNI Keturunan dalam Pasal 6 Ayat 1 UUD NRI 1945

Mengenai hak politik warga negara Indonesia keturunan di dalam hukum Islam memandang bahwa warga negara mempunyai hak politik yang sama seperti warga lainnya. Karena didalam Islam tidak memperkenankan pembedaan warga berdasarkan kelahiran, status sosial, atau profesi.

Pada hakikatnya dalam Islam umat manusia antara satu sama lain tidak ada perbedaan, mereka semua sama, yakni sama-sama keturunan Nabi Adam AS. Selain itu didalam Islam umat manusia seluruhnya, tanpa memandang latar belakang etnis, ras, bahasa, gender, jenis kelamin, dan lain-lain semua sama karena Al-Qur'an mengakui prinsip kemuliaan manusia dalam Surat Al-Isra' Ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَبْرِ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ^{١٠٤}

Artinya: “Dan Sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

Ayat di atas dengan jelas mengakui prinsip kemuliaan manusia yang tertulis didalam nash Al-Qur'an yaitu “karoma” atau kemuliaan bagi seluruh bani Adam. Hal itu mengandung prinsip pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia sebagai hak dasar yang dikaruniakan Allah kepada makhluknya. Hak-hak tersebut di tekankan kepada tiga hal yaitu: persamaan manusia, martabat manusia dan kebebasan manusia.

Islam tidak mengenal faham diskriminasi atau perbedaan rasionalisme, ideologisme, agamaisme, dan sukuisme. Manusia dimata Allah SWT adalah sama, yang membedakannya hanyalah taqwa yang dimiliki oleh manusia tersebut. Seperti yang di firmankan Allah SWT dalam Surat Al-Hujurat Ayat 13 :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ^{١٠٥}

Artinya: “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.

¹⁰⁴ Al-Isra' (17): 70.

¹⁰⁵ Al-Hujurat(49): 13.

Para Ulama fiqh membagi kewarganegaraan seseorang menjadi muslim dan non-muslim. Orang non-muslim terdiri dari ahl al-dzimmi dan musta'min. Dengan demikian penduduk dar al-islam terdiri dari muslim, ahl al-dzimmi, dan musta'min.¹⁰⁶ penyebutan kaum minoritas non muslim yang menjadi warga negara Islam sebagai kaum dzimmi dipengaruhi oleh pandangan fiqh klasik yang membedakan dunia kedalam 3 wilayah, yakni yang pertamaa wilayah Islam (Dar al-Islam), Dar al-harbi dan Dar al-ahdi. Mengenai hak politik disuatu negara Islam (Dar al-islam) para ulama memandang penduduk minoritas seperti ahl al-dzmimi berpendapat bahwa dalam hal politik seperti dalam hal kepemimpinan dan jabatan-jabatan tertentu tidak bisa diberikan. Hak jabatan tertinggi dalam pemerintahan, ketua lembaga eksekutif, perdana menteri, panglima perang, hakim untuk kaum muslimin, penanggung jawab urusan zakat dan sedekah termasuk wakaf dan sebagainya tidak diberikan kepada mereka.¹⁰⁷ Al-Maududi menyatakan bahwa semua jabatan pemerintahan terbuka bagi kaum ahl al-dzimmi, kecuali sedikit jabatan kunci semisal kepala negara dan majelis permusyawaratan.¹⁰⁸

Bukan berarti bahwa adanya diskriminasi terhadap kaum minoritas, akan tetapi hal ini disebabkan karena golongan minoritas tidak mempunyai hak kepemimpinan dan kekuasaan eksekutif dan yudikatif yang memiliki

¹⁰⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah (Kontektualisasi Doktrin Politik Islam)*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 231.

¹⁰⁷ Yusuf Al-Qardawi, *Minoritas Non-Muslim Didalam Masyarakat Islam*, (Bandung: Mizan, 1991), h. 35.

¹⁰⁸ Anis Malik Thoah, *Tren Pluralisme Agama*, (Jakarta: Gema Insani, 2005), h. 43.

fungsi menerapkan syari'at Islam. Oleh sebab itu yang menduduki jabatan tersebut dengan sendirinya orang yang meyakini islam sebagai akidah dan syari'ah.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan hal-hal yang telah dijelaskan dalam rumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Mengenai hak asasi manusia setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hukum Islam dan konstitusi di Indonesia. Dalam hak politik warga negara juga sudah diatur dalam hukum Islam dan konstitusi di Indonesia seperti hak kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk memilih dan dipilih sebagai kepala negara, hak untuk menduduki jabatan umum dalam pemerintahan negara, hak memilih dan dipilih sebagai ketua anggota perwakilan rakyat dan hak untuk memberikan suara dalam pemilu. Menurut hukum Islam dalam hak dipilih dan memilih menjadi kepala negara ada syarat sah khususnya yang mengatur warga negaranya yaitu harus orang-orang yang sefaham dan menganut kebenaran ideologi sehingga timbul penggolongan warga negara yaitu warga negara muslim (mereka yang menganut ideologi negara) dan non-muslim (mereka yang tidak menganut ideologi negara tetapi taat pada peraturan-peraturan negara tersebut. Kemudian berdasarkan konstitusi di Indonesia hak politik warga negara dalam hal dipilih dan memilih sebagai kepala negara khususnya dalam pencalonan kepala negara di Indonesia ada juga persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana tertulis di Pasal 6 Ayat 1 UUD NRI 1945.

2. Berdasarkan hasil penelitian tentang pandangan hukum Islam terhadap hak politik warga negara Indonesia keturunan didalam konstitusi Indonesia, hukum islam dan konstitusi di Indonesia sama-sama mengakui hak politik warga negaranya, mulai dari hak memilih dan dipilih sebagai kepala negara, hak musyawarah atau hak ikut berpartisipasi dalam memberikan ide dan hak menduduki jabatan dalam pemerintahan, semua berlaku apabila telah memenuhi syarat-syarat hak politiknya masing-masing. Perbedaanya terletak pada syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi kepala negara dalam hukum islam dan konstitusi di Indonesia, apabila hukum Islam warga negara harus menganut ideologi suatu negara tersebut, dan apabila konstitusi di Indonesia warga negaranya harus lahir di negara tersebut tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri..

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah diutarakan dalam skripsi ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Masyarakat

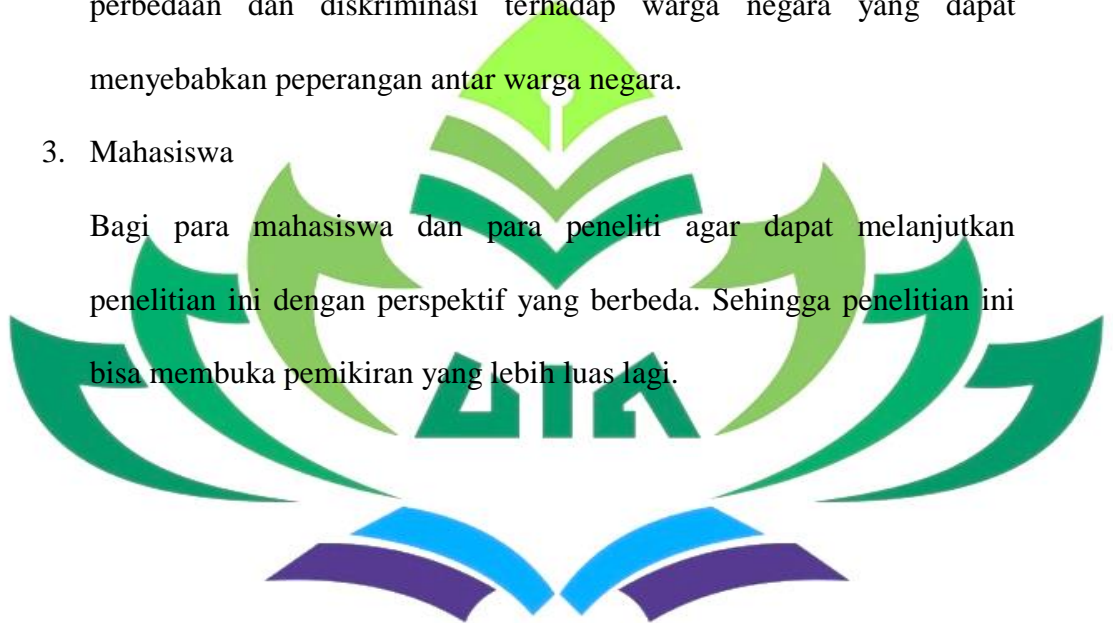
Masyarakat Indonesia yang penduduknya dari berbagai macam etnis, suku, ras, dan agama. Dimana setiap warga negaranya memiliki hak-hak yang sama sebagai warga negara seperti halnya hak sipil, hak sosial, hak ekonomi dan hak politik. Karena negara kita mempunyai semboyan Bhineka Tunggal Ika yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu, keanekaragaman ini yang membuat Indonesia bersatu.

2. Pemerintah

Indonesia sebagai negara konstitusi dimana setiap warga negaranya telah diatur hak-hak dan kewajibannya. Maka dari itu pemerintah harus selalu menjaga dan menjamin setiap aturan yang diberikan kepada warga negaranya, mulai dari warga negara Indonesia asli maupun warga negara Indonesia keturunan sehingga tidak ada lagi perbedaan-perbedaan dan diskriminasi terhadap warga negara yang dapat menyebabkan peperangan antar warga negara.

3. Mahasiswa

Bagi para mahasiswa dan para peneliti agar dapat melanjutkan penelitian ini dengan perspektif yang berbeda. Sehingga penelitian ini bisa membuka pemikiran yang lebih luas lagi.



DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Hikam, Mohammad, dkk, *Fiqh Kewarganegaraan* Jakarta: PB PMII, 2000.
- , *Gerakan Politik Warga Negara dalam Muhammad Nastain dan A. Yok Zakaria Ervani (eds.), Fiqh Kewarganegaraan: Intervensi Agama-Negara Terhadap Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: PB PMII, 2000.
- , *Politik Kewarganegaraan: Landasan Redemokratis Di Indonesia*, Jakarta: Erlangga, 1999.
- Abdillah, Masykuri, *Islam Dan Dinamika Sosial Politik Di Indonesia*, Jakarta: Pt Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Abdul-Rahman, Muhammad Saed, *Tafsir Ibnu Kathir*, London: MSA Publication Limited, 2012
- Ahmad, Amrullah, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional: Mengenang 65 Tahun Prof. Dr. H. Busthanul Arifin, S.H*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Bahansawi, Salim Ali, *As-Syari'ah Al-Muftara 'Alaiha*, Edisi Bahasa Indonesia Diterjemahkan Oleh Musthalah Maufur, *Wawasan Sistem Politik Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Fiqh Maqashid Syariah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Al-Din Wa Al-Siyasah*, Edisi Bahasa Indonesia *Meluruskan Dikotomi Agama Dan Politik* Diterjemahkan Oleh Amru Harahap, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Minoritas Non-Muslim Didalam Masyarakat Islam*, Bandung: Mizan, 1991.
- Amin, Husein Nasution, Muhammad Iqbal, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Klasik Hingga Indonesia Kontemporer*, Jakarta: PT Balebat Dedikasi Prima, 2017.
- Anis, Ibrahim, Dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Kairo: T.tp, 1972.
- Antanasius Harpen, Libertus Jehani, *Tanya Jawab Uu Kewarganegaraan Indonesia*, Tangerang: Visimedia, 2006.
- Arif, Mujar Ibnu, *Hak-hak Politik Non Muslim dalam Komunitas Islam*, Bandung: Angkasa, 2005.

Arif, Firman Muhammad, *Maqashid As Living Law Dalam Dinamika Kerukunan Umat Beragama Di Tana Lawu*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018.

AS, Susiadi, *Metodelogi Penelitian*, Bandar Lampung, LP2M IAIN RADEN INTAN.

Ash Shiddiqy, T.M. Hasbi, *2002 Muutiara Hadits I*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.

Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi Ekonomi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2010.

As-Suyuthi, Jalaludin, *Asbabun Nuzul: Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani, 2008.

Azhar, Muhammad Thahir, *Negara Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup

Batubara, Chuzaimah, Iwan, Dan Hawari Batubara, *Handbook Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Prenamedia Grup, 2018.

Beilharz Peter, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

Bin Hajjaj, Abu Husin Al-Qusyairi, Muslim, *Shahih Muslim Juz I*, Beirut: Dar Ihya' Al-Turats Al-Arabi, T.Th.

Bustamam, Ahmad Kamaruzzaman, *Wajah Baru Islam di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-4*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2008.

Dwi, Poespasari Ellyne, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Diindonesia Cet Ke-1*, Jakarta: Prenada Mediagrup, 2018.

El Muhtaj, Majda, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Gayatri, Irine Hiraswari, *Tionghoa Dan Ke-Indonesia-An: Komunitas Tionghoa Disemarang Dan Medan*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

Hak Politik Warga Negara: Sebuah Perbandingan Konstitusi. (on-line), tersedia di: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html> (8 September 2019)

Hakiem, Lukman, *Merawat Indonesia Belajar Dari Tokoh Dan Peristiwa*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2017

Hasan, Alwi, dkk. 2007. *Kamus besar bahasa indonesia*, Jakarta: balai pustaka, 2007.

Hefner Robert W., *Civil Islam* Jakarta: ISAI, 2000.

Ibn 'Irfah Al-Dasuki, Syam Al-Din Muhammad, *Hasyiyah Al-Dasuki 'Ala Syarh Al-Kabir*, Mesir: Al;Azhariyah, 1345 H.

Ibn Ya'qub Fairuz Abadi, Majd Al-Din Muhammad, *Al-Qamus Al-Muhith*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1995.

Imtihaanah Ani Nurul, Zulaikha Siti, *Distribusi Zakat Produktif Berbasis Model Cibest*, Yogyakarta: CV. Gre Publishing, 2019.

Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah (Kontektualisasi Doktrin Politik Islam)*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.

Irianto, Sulistyowati, *Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.

Izomiddin, *Pemikiran Dan Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Jazuli, Ahzami Samiun, *Kehidupan Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Kartono, Kartini, *Pengantar Teknologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1996.

Kristian Stokke, Eric Hiariej, *Politik Kewargaan Di Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2018.

Kurnia, Asep, *Panduan Praktis Mendapatkan Kewarganegaraan Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Madiong, Baso, Zainuddin Mustapa, Andi Gunawan Raru Chakti, *Pendidikan Kewarganegaraan Civic Education*, Jakarta: Celebes Media Perkasa.

Manan, Abdul, *Perbandingan Politik Hukum Islam Dan Barat*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.

Maryanto, Wahyu Widodo, Budi Anwari, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset 2015.

Mas'udi, Masdar F, "Hak Asasi Manusia Dalam Islam", dalam E. Shobirin Nadj dan Naning Mardiniah (ed.), *Diseminasi Hak Asasi Manusia*, 2000.

- Maududi, Abu A'la, *Hak-Hak Manusia Dalam Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005.
- Moelang, J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosada Karya, 1997.
- Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Pulungan, J Suyuthi, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Rivai, Veithzal, *Pemimpin Dan Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2013.
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Islam*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016
- Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Saefuddin, A.M., *Ijtihad Politik Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Schacht, Joseph, *Pengantar Hukum Islam*, Terjemah An Introduction To Islamic Law, Bandung: Nuansa, 2010.
- Sholeh, Abdul Rohman, Iur Adnan Buyung Nasution, Dan Stewart Fenwick, *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia: Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- Shomad, Abd, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2017
- Siong, Gouw Giok, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Jakarta: Kinta, 1962.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Bandung: Alfabeta, 2004.
- Supiana, *Metodologi Studi Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017
- Sutaryo, et. al. *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdsaran Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, Dan Tertinggal(3T)*, Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, 2015.
- Syarif, Mujar Ibnu, *Hak-Hak Politik Minoritas Non-Muslim Dalam Komunitas Islam: Tinjauan Dari Perspektif Politik Islam*, Bandung: Penerbit Angkasa, 2003.

Thoha, Anis Malik, *Tren Pluralisme Agama*, Jakarta: Gema Insani, 2005.

Tim ICCE UIN Jakarta, *Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Group, 2003.

Tim Pusat Studi Pancasila UGM, *Membangun Kedaulatan Bangsa Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Kawasan Terluar, Terdepan, Dan Tertinggal*, Yogyakarta: Pusat Studi Pancasila, 2015.

Ulum, Bahrul, *Bodohnya NU apa NU Dibodohi?, Jejak Langkah NU Era Reformasi: Menguji Khittah Meneropong Paradigma Politik*, Yogyakarta: LKiS 2002.

Umar, M. Hasbi, "Hukum Menjual Hak Suara Dalam Pemilu Dalam Perspektif Fiqh Siyasah", (on-line), tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/186/393> Jurnal Al-'adalah, Vol, XIII, No. 2 Desember 2014.

Undang-Undang Dasar RI dan Perubahan Nya, Jakarta: Penabur Ilmu.

Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, tahun 1999, Pasal 43.

Wazir, Ahmad, "Politik identitas dalam kasus ahok". (on-line), tersedia di : <https://www.kompasiana.com/ahmadwazier/591d0ff88023bdbe048b4567/politik-identitas-dalam-kasus-ahok> (18 mei 2017).

Widodo, Wahyu, Budi Anwari, Maryanto, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Yogyakarta: CV. Andi Offset 2015.

Yubsir, "Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Metode Interpretasi Teks Hukum: Telaah Filsafat Hukum Islam", tersedia di <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/adalah/article/view/265/432>, dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Jurnal Al-'Adalah, Vol, XI, No. 2 Juli 2013.

Zaidan, Abd Al-Karim, *Masalah Kenegaraan Dalam Pandangan Islam*, Jakarta: Yayasan Al-Amin, 1984.